

LAPORAN
HASIL PENGKAJIAN KOLEKSI
DIORAMA PEMBUATAN SELOKAN MATARAM

Oleh :

V. Agus Sulistya, S.Pd	sebagai	Ketua
Drs. Darto Harnoko	sebagai	Sekretaris
Haris Budiharto, S.S., M.Hum	sebagai	Anggota
Aryani Setyaningsih, S.S	sebagai	Anggota
Moh Rosyid Ridlo	sebagai	Anggota

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

2009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur pertama-tama kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami sehingga laporan hasil pengkajian koleksi museum terkait dengan sejarah pembangunan Selokan Mataram pada masa pendudukan Jepang di Yogyakarta dapat terselesaikan.

Juga pada kesempatan yang baik ini, ucapan terima kasih tidak lupa kami haturkan kepada Ibu Kepala Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada kami yang duduk dalam tim untuk melaksanakan kegiatan pengkajian ini. Juga atas arahan-arrahannya yang sangat berguna bagi kami sehingga memberikan warna tersendiri dalam laporan hasil pengkajian koleksi ini. Disamping itu, tersusunnya laporan ini juga tidak lepas dari peran para nara sumber yang telah memberikan sumbangan informasi untuk melengkapi isi dari laporan pengkajian koleksi ini. Oleh karena itu kami ucapkan banyak terima kasih. Juga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukung dalam bentuk apapun kepada kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu kami mengucapkan banyak terima kasih.

Laporan hasil pengkajian koleksi museum terkait dengan sejarah pembangunan Selokan Mataram pada masa pendudukan Jepang di Yogyakarta ini, merupakan satu bentuk pertanggungjawaban tim kepada kepala Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta yang telah memberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan penelitian koleksi. Laporan ini berisi uraian deskriptif naratif tentang sejarah pembangunan Selokan Mataram yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk sumber primer dari para nara sumber yang berhasil ditemui, maupun sumber sekunder dari literatur-literatur yang terkait. Diharapkan dari hasil pengkajian koleksi ini dapat memberikan tambahan informasi bagi pengunjung museum, khususnya mereka yang kebetulan mengamati koleksi yang terkait dengan sejarah pembangunan Selokan Mataram (diorama pembangunan Selokan Mataram).

Meski demikian kami tetap menyadari, bahwa laporan hasil pengkajian koleksi ini masih jauh dari kesempurnaan. Di beberapa bagian masih banyak terdapat kekurangan yang harus dibenahi. Oleh karena itu dengan kerendahan hati kami mohon masukan dari berbagai pihak yang peduli untuk memberikan koreksi dalam bentuk apapun baik kritik, saran, masukan atau komentar demi perbaikan hasil kajian ini. Diharapkan dengan semakin lengkapnya informasi yang berhasil dipublikasikan melalui koleksi-koleksi museum, misi museum sebagai sumber informasi akan segera terwujud.

Namun, apapun bentuknya, kami tetap berharap bahwa laporan hasil pengkajian koleksi ini dapat memberikan nilai tambah bagi museum dalam fungsinya sebagai sumber informasi, dan memberikan tambahan pengetahuan bagi para pengunjung museum dan siapapun juga yang memanfaatkan laporan hasil pengkajian koleksi ini. Tidak perlu ada penjelasan, bahwa kita semua sepakat bahwa kebenaran dalam sejarah adalah relatif. Dipandang benar bila itu masih dapat didukung dengan fakta-fakta yang membenarkan. Dan dapat dipandang salah jika di dapat fakta-fakta yang menggugurkannya. Sejarah adalah merupakan sebuah *Sustainable Research* (penelitian yang berkelanjutan).

Akhirnya kami semua berharap agar hasil kajian ini bukan menjadi titik akhir dari sebuah analisa sejarah, namun kami berharap hasil pengkajian ini justru menjadi titik awal dari analisa sejarah yang nantinya akan selalu dikaji dan dikaji ulang sehingga didapatkan kebenaran yang otentik dan kredibel. Terima kasih.

Yogyakarta, Mei 2009

Tim Pengkajian

V. Agus Sulistya, S.Pd

Drs. Darto Harnoko

Haris Budiharto, S.S. M.Hum

Aryani Setyoningsih, S.S.

Moh Rosyid Ridlo

Mengetahui / menyetujui
Kepala Museum Benteng Vredeborg
Yogyakarta

Dra. Sri Ediningsih, M.Hum
NIP 195805011981032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Ruang lingkup dan permasalahan	4
c. Metode dan tujuan penelitian	5
d. Sistematika penulisan	7
e. Pelaksana dan waktu pelaksanaan	8
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG	9
a. Kondisi Politik – Pemerintahan	9
b. Perubahan – Perubahan Penting	12
c. Kondisi Pendidikan dan Sosial Budaya	14
BAB III PEMBANGUNAN SELOKAN MATARAM	23
a. Romusa Di Yogyakarta	25
b. Kebijakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX	34
c. Proyek Pembangunan Selokan Mataram	40
BAB V PENUTUP	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	53

LAPORAN
HASIL PENGKAJIAN KOLEKSI
DIORAMA PEMBUATAN SELOKAN MATARAM



Oleh :

V. Agus Sulistya, S.Pd	sebagai Ketua
Drs. Darto Harnoko	sebagai Sekretaris
Haris Budiharto, S.S., M.Hum	sebagai Anggota
Aryani Setyaningsih, S.S	sebagai Anggota
Moh Rosyid Ridlo	sebagai Anggota



DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

2009

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penjajahan atau kolonialisme tidak selamanya dirasakan sebagai kesengsaraan yang tidak ada segi positifnya. Ada hal-hal positif yang pastinya dapat dirasakan di kemudian hari. Manfaat tersebut dapat juga terjadi diakibatkan adanya keterlibatan tokoh-tokoh pribumi atau penguasa-penguasa local yang selalu memikirkan nasib rakyatnya. Tidak berbeda pula penjajahan oleh bangsa Jepang yang mendarat di bumi Nusantara ini yang mengaku sebagai *saudara tua* bangsa Indonesia yang begitu menyengsarakan rakyat Indonesia.

Penjajahan oleh bangsa Jepang didasari dengan adanya perang Pasifik atau Asia Timur Raya yaitu antara pihak Sekutu (Amerika, Inggris, Perancis dan Belanda) dengan Jepang yang dibantu oleh Jerman dan Italia. Setelah sebagian Asia Tenggara dikuasai Jepang, termasuk Philipina, maka Jepang melanjutkan agresinya ke Indonesia melalui Davao, Philipina. Serangan ini dipimpin oleh Admiral Kurita, dengan prioritas serangan ke daerah yang memiliki bahan pendukung perang. Antara bulan Januari dan Februari 1942 serangan diarahkan ke pihak Sekutu di daerah Tarakan sebagai sumber minyak, Balikpapan dan Banjarmasin sebagai serangan ke wilayah Indonesia barat dari pandangan Davao, Philipina.

Serangan tersebut ternyata tidak dapat ditandingi oleh kekuatan Belanda dan sekutunya dan dalam waktu relatif singkat kekuasaan pendudukan berpindah tangan. Hal ini ditandai dengan penyerahan Indonesia dengan tanpa syarat kepada Jepang dalam *Kapitulasi Kalijati* di Subang Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. penyerahan ini dilakukan oleh Jenderal Ter Porten dari pihak Belanda kepada Letnan Jenderal Imamura.¹ Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kondisi sosial politik di Indonesia.

Pada akhirnya Yogyakarta yang merupakan salah satu daerah strategis Indonesia juga diduduki oleh Jepang pada tanggal 6 Maret 1942. Iring-iringan truk yang ditumpangi bala tentara Jepang disaksikan oleh rakyat Yogyakarta di sepanjang jalan tanpa merasa takut. Iring-iringan truk tersebut melewati jalan Malioboro sambil serdadu Jepang menyerukan “Nippon Indonesia sama-sama merdeka” dan agitasi semacamnya untuk

¹ Ahmad Mansur Sueryanegara, *Pemberontakan Tentara PETA di Cileunca Pengalengan Bandung Selatan*, (Jakarta : Yayasan Wira Patria Mandiri, 1996), hal : 65.

mendapat perhatian dan simpati rakyat Yogyakarta sambil menuju ke markas tentara Jepang tepatnya yaitu yang sekarang dijadikan sebagai Hotel Garuda Yogyakarta.²

Setelah Yogyakarta dikuasai oleh Jepang maka utusan Jepang menemui Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai penguasa lokal Yogyakarta, melalui utusan Jepang tersebut, Sri Sultan HB IX mengatakan dengan tegas bahwa kebijakan apapun yang akan dikeluarkan oleh Jepang harus dibicarakan terlebih dahulu dengan beliau. Ternyata permintaan tersebut dikabulkan oleh Jepang. Bahkan Jepang melegitimasi kekuasaan Sultan melalui pengukuhan Sultan sebagai *Koo* atau pemimpin yang diberi wewenang mengatur pemerintahan *kooti* (kasultanan) Yogyakarta. Tentu saja hal ini merupakan awal yang bagus bagi Sri Sultan dalam memperjuangkan nasib rakyatnya dikemudian hari. Hal ini dilakukan oleh Sri Sultan berkat pengalaman dan kemauannya untuk selalu belajar dalam menyikapi kondisi penjajahan. Serta sebagai orang Jawa, Sri Sultan meyakini akan tradisi Jawa seperti *wisik* atau bisikan gaib maupun ramalan. Keyakinannya terhadap ramalan *Joyoboyo* bahwa kekuasaan orang bule akan berakhir dan digantikan oleh orang berkulit kuning dan berkaki pendek yang datang dari pulau Tembini, yang akan berkuasa seumur jagung lamanya.

Mengenai taktik perjuangan, Sri Sultan sadar akan kemampuannya apabila dilakukan perlawanan secara frontal tak akan bisa berhasil karena sarana dan prasarana perang serta siasat perang yang kalah jauh dengan penjajah serta pengalaman sejarah dimana penjajah selalu menggunakan siasat pecah belan atau adu domba untuk mengurangi kekuatan perjuangan. Pada akhirnya Sultan lebih memikirkan nasib rakyatnya dari pengaruh pendudukan Jepang.

Kebijakan Sri Sultan yang pro rakyat tersebut akhirnya dapat meminimalisir nasib rakyat dari kesengsaraan yang hebat. Pada waktu itu Jepang sedang memobilisasi massa untuk mendukung program angkatan perangnya dalam perang Asia Timur Raya (sekutu menyebutnya dengan perang Pasifik). Perang Pasifik merupakan perang yang membutuhkan sarana dan prasarana yang banyak karena wilayah perangnya yang luas.

Program yang dilakukan dalam memobilisasi massa yaitu mengadakan kerja paksa atau sering disebut dengan *Romusa*. Para laki-laki dewasa yang berumur 16 – 25 tahun atau lebih dan tidak mempunyai pekerjaan diwajibkan mengikuti *romusa*. Pengumpulan para pekerja *romusa* di daerah-daerah diatur oleh lembaga yang dibentuk oleh tentara Jepang. Lembaga tersebut disebut dengan PPR (Panitia Pengerahan *Romusa*) yang

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1977), hal : 159

berkewajiban untuk mengerahkan tenaga *romusa*.³ *Romusa* ini bertujuan untuk membangun bangunan yang dibutuhkan oleh tentara Jepang, seperti jalan, jembatan, lapangan terbang dan lain sebagainya serta wilayah pengiriman para *romusa* ini adalah seluruh wilayah Asia Tenggara. Jadi, para pemuda Indonesia yang dijadikan sebagai pekerja *romusa* belum tentu bekerja di wilayah Indonesia. Sungguh menyengsarakan sekali kondisi ini ditambah lagi dengan perlakuan yang sewenang-wenang dari para tentara Jepang. Sedangkan kaum perempuan dijadikan pelacur atau *jugun ianfu* untuk melayani nafsu bejat tentara Jepang serta bekerja mengurus pekerjaan rumah tangga akan keperluan tentara Jepang.

Mengetahui kondisi rakyatnya yang seperti itu selanjutnya Sri Sultan melaporkan kepada Jepang bahwa daerahnya merupakan daerah yang miskin yang perlu ditingkatkan penghasilannya. Jika penghasilan masyarakat bertambah, maka rakyat bisa menyettor penghasilannya lebih besar dari sebelumnya kepada Jepang. Hal ini dilaporkan dengan cara memanipulasi angka jumlah penduduk dan jumlah hasil bumi. Dengan begitu hasil bumi seperti beras, jagung, singkong, kacang tanah dan *gaplek* (ketela kering) yang harus disetorkan kepada pihak Jepang dapat diminimalisir.

Untuk meningkatkan produksi pertanian di daerah Yogyakarta, Sri Sultan mengusulkan pembangunan pintu air dan irigasi. Pada waktu itu pemerintah pendudukan Jepang sedang merencanakan peningkatan produksi pangan dan dilaksanakan oleh Moji Shorei yang telah mendapatkan persetujuan dari pembesar ekonomi Jepang, Tuan Tyokan Kokka, dan direncanakan hasil padi di Yogyakarta akan bertambah sedikitnya 30%.⁴ Dari hubungan usulan Sultan dengan program Jepang tersebut terlihat sinkronisasi tujuan karena dengan pembangunan pintu air dan saluran air diharapkan lahan-lahan yang tadinya belum bisa berproduksi secara maksimal akhirnya oleh rakyat lahan tersebut bisa diolah dan menghasilkan produksi pertanian yang baik. Implikasi dari keberhasilan ini Sri Sultan berjanji bahwa rakyat Yogyakarta akan memberikan bantuan pangan yang lebih untuk kesuksesan Perang Asia Timur Raya.

Dengan dasar yang rasional akhirnya usulan Sri Sultan untuk membangun pintu air dan saluran air disetujui oleh pemerintah pendudukan Jepang. Akibat yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat Yogyakarta dari proyek pembangunan ini adalah rakyat Yogyakarta yang masih berumur produktif bisa terselamatkan dari mengikuti kewajiban *romusa*.

³ *Ibid*, hal : 165

⁴ *Buku Kenangan 50 Tahun Republik Indonesia di Yogyakarta*, (Yogyakarta : Panitia Gabungan Peringatan HUT ke 50 Kemerdekaan RI Bhakti Pertiwi Prop. DIY), 1995, hal : 20

Dalam pembangunan ini Jepang juga memberikan sedikit wewenang kepada pemerintahan *kooti* (kasultanan) untuk mengatur para pekerjanya, sehingga para pekerja di proyek ini tidak merasa terlalu tertekan dalam bekerja karena tidak hanya ditunggui atau dimandori oleh tentara Jepang tetapi juga oleh pribumi yang bekerja sebagai aparat pemerintahan saat itu.

B. RUANG LINGKUP DAN PERMASALAHAN

Pengkajian koleksi minirama tentang “*Pembangunan Selokan Mataram Dalam Lintasan Sejarah*” ini memfokuskan pada latar belakang mega proyek pembangunan Selokan Mataram pada masa pendudukan Jepang. Oleh pemerintah pendudukan Jepang Selokan Mataram tersebut dikenal dengan nama *Gunsei Yosuiro* atau Kanal Yoshiro. Proyek ini pada waktu itu diharapkan dapat membantu wilayah Yogyakarta dalam menekan kekurangan pangan walaupun beberapa persen dari hasil produksi tetap saja harus disetorkan untuk keperluan tentara Jepang.

Dalam penelitian ini terdiri dari tiga ruang lingkup atau batasan agar menghasilkan penelitian yang baik. Dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga ruang lingkup atau batasan. Hal ini diperlukan agar penelitian tetap focus dan mengena pada tema yang diteliti. Ketiga ruang lingkup tersebut adalah ruang lingkup waktu, ruang lingkup spatial atau tempat dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah masa pendudukan Jepang yaitu antara tahun 1942 sampai tahun 1945. Sedangkan ruang lingkup spatialnya adalah kondisi wilayah Yogyakarta saat pendudukan Jepang. Kemudian untuk ruang lingkup materinya terbatas pada latar belakang pembangunan Selokan Mataram dan pengaruh pembangunan Selokan Mataram itu sendiri.

Permasalahan dalam pengkajian pembangunan Selokan Mataram yang salah satu fragmen adegannya terdapat dalam minirama Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta tentang pembangunan Selokan Mataram adalah asal-usul pembangunan Selokan Mataram dan kondisi sosial politik ekonomi masyarakat pada masa pendudukan Jepang di Yogyakarta. Dari dua poin tersebut yang saling berhubungan dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini melalui beberapa pertanyaan penting. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah :

1. Bagaimana kondisi Yogyakarta sebagai salah satu *kooti* (kasultanan) yang berkedudukan dibawah *Dai Nippon Gun Sireiken* (Panglima Besar Bala Tentara Jepang) ditinjau dari segi ekonomi, budaya, sosial dan politik ?

2. Seberapa besar peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai *ko* atau pimpinan *kooti* (kasultanan) yang diangkat secara resmi oleh Jepang dalam membuat kebijakan politiknya menyikapi kondisi rakyatnya ?
3. Apa yang melatarbelakangi pembangunan Selokan Mataram ?
4. Pengaruh apa yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan Selokan Mataram ?

C. METODE DAN TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian diperlukan metode untuk mengembangkan penelitian tersebut. Ada lima metode penelitian yang bisa dipilih dan digunakan, yaitu metode historis atau sejarah, metode deskriptif, metode korelasional, metode eksperimental dan metode eksperimental. Metode-metode tersebut bisa dipilih salah satu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisa peristiwa-peristiwa masa lampau lebih tepat menggunakan metode sejarah.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang lazim juga disebut metode sejarah karena bertujuan menggambarkan dan menganalisa latar belakang pembangunan Selokan Mataram. Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.⁵

Dengan demikian langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tahap-tahap dalam metode sejarah, yaitu :

1. Pengumpulan Sumber (*heuristic*)

Pengumpulan sumber berpedoman pada data-data yang berkaitan dengan pendudukan Jepang di Yogyakarta pada umumnya dan pembangunan Selokan Mataram pada khususnya. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara kepada pelaku atau saksi mata sejarah serta sejarawan yang mahir dan menguasai tema tentang pendudukan Jepang di Yogyakarta.

Data-data yang didapat dari kesaksian langsung bukan dari sumber lain melainkan dari tangan pertama disebut dengan sumber primer. Dengan kata lain sumber primer didapat dari kesaksian dari para pelaku atau saksi mata langsung. Hal ini bisa juga dilakukan dengan wawancara kepada tokoh utama atau orang yang langsung mendengar dari tokoh utama atau membaca dokumen yang merupakan tulisan

⁵ Gilbert J. Garraghan dalam Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hal : 43

pertama dari kesaksian pelaku. Sedangkan sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi mata atau pelaku, seperti wawancara dengan sejarawan yang menguasai sejarah periode pendudukan Jepang di Yogyakarta.

Sumber lain bisa berupa sumber tertulis yang dapat berupa buku, majalah, koran, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pendudukan Jepang. Sumber tertulis tersebut dapat diperoleh di perpustakaan kantor arsip dan lain-lain.

2. Kritik atau verifikasi sumber

Setelah berbagai macam sumber sejarah terkumpulkan, dilakukan penelusuran lebih dalam terhadap sumber-sumber tersebut untuk memperoleh keabsahan dan validitas sumber. Setelah hasil validitas sumber selesai kemudian dilakukan tahap selanjutnya yaitu interpretasi sejarah.

3. Interpretasi atau penafsiran sejarah

Penafsiran sejarah sering juga disebut dengan analisis sejarah. Dalam proses ini dilakukan dengan pencarian latar belakang Selokan Mataram dibangun. Hal ini juga bisa dilakukan dengan membandingkan data guna menyingkap peristiwa yang melatarbelakangi pembangunan selokan Mataram.

4. Historiografi atau penulisan sejarah

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam rangkaian metode sejarah. Sejarah pembangunan Selokan Mataram dipaparkan secara jelas dan argumentatif yang didasarkan pada detail-detail fakta sejarah baik secara deduktif maupun induktif yang akurat serta ditulis sesuai dengan urutan waktu.

Pembangunan Selokan Mataram atau Kanal Yoshiro pada masa pendudukan Jepang merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Hikmah terpendam dalam pembangunan selokan tersebut memberikan tauladan bagi para penerus bangsa. Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang telah mengenyam pendidikan bangsa barat yang sesungguhnya sejak berumur enam tahun karena dipisah dari keluarga keraton untuk dititipkan kepada keluarga bangsa Eropa, ternyata tetap merupakan seorang pemimpin yang selalu berpihak kepada rakyat.

Pembangunan Selokan ini juga dilaksanakan selama mungkin agar para rakyat Yogyakarta yang masih produktif terhindar dari kewajiban mengikuti *romusa*. Setelah adanya Selokan Mataram ini perekonomian Yogyakarta terstimulasi, lahan-lahan yang tadinya tidak terjamah saluran air akhirnya dapat diairi dan kemudian dapat berproduksi lebih baik.

Tradisi Jawa yang selalu meyakini akan wisik, pitutur agung dan lain-lain akhirnya dapat direalisasikan. Salah satunya dari Sunan Kalijogo yang memberikan *wejangan* atau nasehat bahwa Yogyakarta akan menjadi wilayah yang makmur apabila sungai Progo di sebelah barat bertemu dengan Sungai Opak di sebelah timur. Nasehat tersebut terwujud dengan dibangunnya Selokan Mataram yang berhulu di Sungai Progo dan berakhir di Sungai Opak.

Akhirnya dari penelitian sejarah tentang Selokan Mataram dalam lintasan sejarah dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum
 - a. Menyingkap latar belakang pembangunan Selokan Mataram
 - b. Menggambarkan kondisi rakyat Yogyakarta saat pendudukan Jepang
 - c. Mengungkap kesejatan jiwa satria Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai pengayom masyarakat Yogyakarta
 - d. Hasil dari penelitian ini dapat menambah khasanah sumber sejarah tentang latar belakang pembangunan Selokan Mataram.
2. Tujuan Khusus
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber sejarah dalam mendeskripsikan koleksi sejarah di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta yang berupa minirama adegan pembangunan Selokan Mataram.
 - b. Mensosialisasikan hasil kajian kepada masyarakat sebagai perwujudan fungsionalisasi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

D. SISTEMAIKA PENULISAN

Penelitian koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta ini terdiri dari beberapa bab. Pembagian pembahasan ini bertujuan agar karya tulis mudah dipahami. Adapun pembagian bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I, dalam penulisan ini berupa pendahuluan. Di dalam bab ini berisi beberapa sub bab. Masing-masing sub bab tersebut adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, metode penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi pembahasan tentang kondisi sosio ekonomi, politik dan budaya Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang.

Bab III, menguraikan tentang aktivitas masyarakat Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang berkenaan dengan adanya *romusa*. Selanjutnya dilanjutkan dengan

pembahasan tentang pembangunan Selokan Mataram dan manfaat dari pembangunan tersebut.

Bab IV, adalah penutup. Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal pokok atau kesimpulan berkaitan dengan penelitian ini.

E. PELAKSANA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengkajian koleksi yang berjudul “*Selokan Mataram Dalam Lintasan Sejarah*” ini berlangsung selama dua bulan yaitu mulai bulan April sampai dengan bulan Mei 2009. Adapun pelaksana kegiatan pengkajian ini ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta Nomor : KP.105/217/MBVY/DKP/2009 tanggal 30 Maret 2009, dengan susuna sebagai berikut :

1. Vincensius Agus Sulistya, S.Pd selaku ketua
2. Drs. Darto Harnoko selaku sekretaris
3. Haris Budiharto, SS, M.Hum selaku anggota
4. Aryani Setyaningsih, SS selaku anggota
5. Muhammad Rosyid Ridlo selaku anggota

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

A. Kondisi Politik-Pemerintahan

Perang Pasifik pecah antara sekutu dan Jepang tahun 1941. Kelanjutan dari perang itu bala tentara Jepang dengan gerakan yang cepat menyerbu wilayah Asia Tenggara. Pada awal Maret tentara Jepang sudah mendarat di Jawa dan akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada pihak Jepang¹

Militer Jepang selanjutnya menetapkan Undang-undang No. 1 tahun 1942 tentang pemerintahan bala tentara Jepang di Indonesia, yang mengatur tentang sistem pemerintahan militer di daerah-daerah yang telah diduduki. Selanjutnya ditentukan pula bahwa badan pemerintahan dengan kekuasaannya, hukum dan pemerintahan Hindia Belanda untuk sementara diakui sah asalkan tidak bertentangan dengan aturan-aturan pemerintahan militer Jepang.²

Berdasarkan *Kan Po* (Berita Pemerintah) yang diterbitkan oleh Gunseikanbu di Jakarta dapatlah diketahui tata pemerintahan daerah di Jawa-Madura. Pada bulan Agustus 1942 *Gunseireikan* menetapkan undang-undang 1942/27 tentang perubahan tata pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut di wilayah Jawa dibagi dalam daerah *Syun* (Residentie pada zaman Hindia Belanda). *Syun* dibagi dalam *Ken* (Regentschap) dan *Si* (Stadgemeente). Dibentuk pula *Tokubitu Si* (Standgemeente luar biasa), yaitu kota yang sangat penting dalam lapangan politik, ekonomi, social dan kebudayaan yang khusus ditunjuk oleh Gunseikan. Jakarta adalah satu-satunya kota yang ditunjuk sebagai *Tokubetu Si*. Untuk *Syun* dan *Tokubetu Si* kemudian ditetapkan undang-undang 1942/28 tentang aturan pemerintah *Syun* dan aturan pemerintahan *Tokubetu si*. Sedang untuk *Ken* dan *Si* ditetapkan Osamu Seitei 1943/12 tentang Ken dan Si dan ditetapkan Osamu Seitei 1943/13 tentang peraturan daerah Ken dan Si serta peraturan Zi-Sei-Hi. No. 1616.³

¹ Pemerintahan Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati-Subang. Namun demikian hingga kini dokumen tertulis tentang kapitulasi Belanda kepada Jepang itu hampir tidak dapat ditemukan. *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Jakarta : Depdikbud, 1976), hal 271.

² Tashadi, dkk., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) di DIY*, (Jakarta : Depdikbud, 1986), hal : 48.

³ *Ibid.*, hal : 272

Dalam garis besarnya pokok-pokok peraturan di atas memuat ketentuan sebagai berikut : *Syun* merupakan daerah tingkat teratas yang mempunyai pemerintahan sebagai suatu kesatuan dalam masa pemerintahan militer Jepang *Sun* membawahkan *Ken* dan *Si* dalam lingkungan wilayahnya. *Tokubetu Si* mempunyai kedudukan yang lebih kurang sama dengan *Syun*, karena tidak dibawah sesuatu *Syun*, melainkan dibawah langsung *Gunsaikan*.⁴

1. Untuk masing-masing daerah itu diangkat seorang kepala daerah (*syuntyookan, Tokubetu sityo, Kentyoo, sityoo*).
2. Ketentuan-ketentuan dalam *Regentschapordonnantie* dan *Handsgemeente-Ordonantie* dulu tetap berlaku bagi *Ken* dan *Si*
3. Wewenang yang dulu dijalankan oleh raad dan college pemerintah harian daripada *regentschap* dan *stadgemeente* kemudian dijalankan semua oleh *kentyo* dan *sityoo*. Sistem pemerintahan tunggal.
4. Sistem pemerintahan tunggal tanpa dewan perwakilan rakyat dilaksanakan sampai bulan September 1943. Dalam bulan September itu ditetapkan peraturan yang mengatur tentang pembentukan dewan-dewan baik di pusat maupun daerah yang berfungsi sebagai badan penasehat pejabat tunggal.
5. *Si* menyelenggarakan segala urusan pemerintahan dalam lingkungan wilayahnya. Urusan pemerintahan umum (pangreh praja) yang dalam *stadgemeente* dulu diurus oleh *regent* dan pejabat-pejabat bawahannya kini dipegang oleh *sityoo*.
6. Pengawasan terhadap daerah otonom yang dulu dipegang oleh Gubernur Jenderal dan aparat pemerintah propinsi pada zaman Jepang di lakukan oleh *Gunseikan*.

Mengenai persekutuan-persekutuan masyarakat adat dan *zelfbesturende landschappen* di Jawa, pada umumnya, tetap dipertahankan seperti keadaan pada masa Hindia Belanda. Namun nama-namanya saja yang berubah, desa disebut *Ku* dan *landschap* dinamakan *kooti*. Para raja *landschappen* ini melalui pengambilan sumpah dan pelantikan baru memutuskan hubungannya dengan Kerajaan Belanda. Mereka ini disebut dengan *Koo*. Kedudukan *Koo* dianggap sebagai anggota keluarga raja Jepang. Pada umumnya pemerintahan militer Jepang di Indonesia tetap merupakan politik desentralisasi Hindia Belanda. Namun pembentukan daerah dihubungkan dengan siasat militer untuk menghadapi pelbagai kemungkinan dalam masa perang.

⁴ *Ibid.*, hal : 49

Untuk memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan pemerintahan Kasultanan dan Paku Alaman, sejak zaman Belanda, Jepang dan Zaman Republik Indonesia berikut ini di terangkan secara singkat susunan kedua sistem pemerintahan itu.

Di zaman Belanda Susunan pemerintahan Kasultanan sebagai berikut :

1. S.P Kanjeng Sultan
2. Papatih Dalem
3. Bupati Patih Kapatihan (Sekretaris 1)
4. Bupati Prentah (Sekretaris II)
5. Kabupaten –kabupaten
6. Kawedanan-kawedanan
7. Kelurahan-kelurahan

Susunan pemerintahan di Paku Alaman sebagai berikut :

1. S.P. Kanjeng Gusti Paku Alam
2. Bupati Patih
3. Asisten Wedana Kota, merangkap Sekretaris
4. Kabupaten (Adikarta)
5. Kapanewon-Kapanewon
6. Kalurahan-kalurahan

Yang tersebut diatas adalah susunan Pamong Praja (*Bestuur*) yang dulu lazim disebut Pangreh Praja

1. Pangreh Praja, pemerintahan pusat, dan juga mempunyai bagian-bagian lainnya.
2. Pengadilan daerah dalem yang dihapuskan pada zaman Kemerdekaan (1947) karena tidak adanya *klassy statie*
3. Keuangan yang dibagi lagi menjadi : Dinas akuntan; Urusan *begroting*; Urusan pajak
4. Perguruan-perguruan; pada zaman Hindia Belanda Dinas Kasultanan (dan Paku Alaman) hanya sekolah desa saja. Pada Zaman Jepang sekolah-sekolah rakyat dan menengah diserahkan kasultanan
5. Kesehatan Rakyat; pada zaman Belanda pemimpinnya gubernur selanjutnya diteruskan oleh Jepang.
6. Kemakmuran; Pertanian; Kehewanan; Kerajinan; Kerajinan; Kehutanan; adalah dinas Gubernemen Belanda dan dilanjutkan pada zaman Jepang
7. Pekerjaan Umum, sifatnya lokal, Gubernemen hanya menguruskan bangunan-bangunan kepunyaan sendiri, dengan dipimpin oleh seorang *hoofdorpzichter*.
8. Penghasilan Negeri; Air ledeng; Pasar; Perusahaan; tanah tetap sampai sekarang.

Pada Zaman Belanda status kasultanan Yogyakarta diatur dengan politik kontrak. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh *Rijkbestuurde* yang diangkat oleh raja, dengan persetujuan Belanda. Sebelum memegang jabatannya, *Rijkbestuurde* itu bersumpah pada pemerintah Belanda dan jika ada konflik antara Belanda dan raja maka *Rijkbestuurde* harus memihak pada Belanda

B. Perubahan-Perubahan penting dalam Zaman Jepang

Pada bulan April 1945 Kawedanan dihapuskan, di Pusat diadakan *Panityati*, yang berjumlah 6 yaitu:

1. Sanapanitra (Sekretariat)
2. Wiyatapraja (Pendidikan)
3. Racana Panwara (Perencana Penerangan)
4. Ayahan Umum (sekarang Jawatan Pemerintahan Umum)
5. Ekonomi
6. Yayasan umum

Pada tanggal 1 Agustus 1945 Jabatan Papatih Dalem (Rijksbestuurder) kosong dan tidak diisi lagi. S.P. Sultan memegang pimpinan sendiri. Diadakan utarayapati, sebagian pekerjaan yang terlalu besar untuk dimasukkan dalam paniradyapati. Akan tetapi kecil untuk dijadikan paniradyapati sendiri. Tiga Udaradya yang diadakan ialah:

1. Urusan pegawai
2. Pemeriksa keuangan
3. Sridarmadjuki (pengadilan Darah Dalem)

Kota Yogyakarta telah berdiri bersamaan dengan dibangunnya kraton Yogyakarta pada 1755 yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi. Setelah dinobatkan menjadi sultan, Pangeran Mangkubumi memakai nama Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sultan inilah yang menurunkan para Sultan di Yogyakarta hingga ke X saat ini.

Di samping kekuasaan Belanda, di daerah Yogyakarta ada dua kekuasaan lain, ialah pemerintahan Kasultanan dan Paku Alaman. Daerah Paku Alaman dan luar kota meliputi daerah sekitar Adikarto. Tempat kedudukan pemerintah Daerah Yogyakarta ialah Kota Yogyakarta. Ditengah-tengah kota ini dari utara ke selatan melintang sungai code. Sebelah Barat Sungai Code merupakan wilayah kasultanan, sedang sebelah Timur Sungai Code merupakan Paku Alaman.

Pada Zaman Hindia Belanda kota Yogyakarta hanya merupakan daerah distrik yang termasuk lingkungan kabupaten Yogyakarta. Pada tahun 1941 oleh anggota Volksraad

Hindia Belanda R.W. Juyo Akhadhudoyo pernah diusulkan kepada Volksraad agar kota ini dijadikan sebagai stadgemeente. Usul ini ditolak oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, karena pembentukannya sebagai stadgemeente itu akan berarti terlepasnya kota Yogyakarta dari lingkungan Kasultanan Yogyakarta.

Pada waktu zaman pendudukan Jepang. Yogyakarta juga mengalami beberapa perubahan susunan pemerintahan. Pada bulan April 1945 terjadi suatu perubahan, yaitu Kabupaten Yogyakarta yang dulunya mempunyai urusan meliputi Kalasan, Sleman dan Godean di pecah menjadi dua yaitu kabupaten Kota dan Kabupaten Sleman yang daerahnya meliputi kawedanan-kawedanan Sleman, Kalasan dan Godean. Nama kabupaten dalam bahasa Jepang disebut Si. Kota Yogyakarta tidak mempunyai status Gemeente. Jadi masih tetap di bawah pemerintahan zelfbestuur yang berpusat di kepatihan Danurjan.

Pemerintah Kasultanan Yogyakarta, dahulu disebut zelfbestuur, yaitu pemerintahan yang diatur sendiri, mempunyai alat peraturan sendiri dan tidak harus menurut peraturan-peraturan pemerintah jajahan Belanda yang berpusat di Jakarta. Meskipun demikian pemerintah kasultanan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari campur tangan pemerintah Belanda.

Para sultan yang bertahta selama itu berkedudukan sebagai Kepala Daerah Kasultanan, akan tetapi tidak aktif memegang pemerintahan. Adapun yang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan adalah Papatih Dalem Rijksberstuurde, dengan sebutan Raden Ario Adipati Danurejo.

Zaman Jepang Kemantren Panembahan dan kadipaten dijadikan satu Kemantren Kraton. Selanjutnya Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Karangwaru menjadi satu kemantren Tegalrejo. Sedangkan Kelurahan Kuncen ditambah dengan sebagian daerah kemantren Ngampilan dan sebagian daerah Kemantren Mantrijero yang terletak disebelah Kulon kali Winongo menjadi Kemantren Wirobrajan. Dengan perubahan-perubahan ini maka di dalam kota terdapat dua belas kemantren dan dua orang Bupati. Bupati Kasultanan adalah KRT Harjodiningrat dan daerah Kota Paku Alaman dipimpin langsung oleh Patih Paku Alaman KPR Suryoatmodjo. Wedana dan Asisten Wedana dalam kota dihapuskan dan sebutan Mantri Kepala Kampung telah lama dirubah menjadi Mantri Pangreh Praja. Perubahan itu dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebelum Jepang menduduki Indonesia dan para Mantri Pangreh Praja berhubungan langsung dengan Bupati Kota tersebut.

Dengan adanya reorganisasi kabupaten-kabupaten pada zaman penjajahan Jepang diseluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 1945, yang tadinya Kota Yogyakarta yang meliputi kawedanan-kawedanan kota, Sleman, Kalasan dijadikan kabupaten yang berdiri sendiri dikepalai seorang Bupati Kota dengan sebutan Shi-Co. Dengan demikian maka kabupaten Kota tidak dinamakan Yogyakarta Ken, melainkan diberi nama Yogyakarta Shi (yang berarti Kota otonom). Akan tetapi meskipun mengalami perubahan nama Yogyakarta, tetap merupakan sebuah kabupaten yang bersifat administratif yang tidak memiliki kekuatan otonomi sama sekali. Di samping itu Yogyakarta Shi-Cho hanya mempunyai kekuasaan atas kota Yogyakarta yang menjadi daerah Pakualaman dengan petugas seorang Bupati. Dengan demikian Kota Yogyakarta pada saat itu mempunyai dua orang Bupati Kota, ialah Bupati Kota Kasultanan dan Bupati Kota Paku Alaman.

Sejak Jaman Jepang pekerjaan Mantri Pamong Praja menjadi semakin berat, di samping urusan administratif terutama menteri PP berkewajiban menggerakkan rakyat dalam berbagai kegiatan lapangan untuk kepentingan peperangan. Rukun Tetangga (Tonari Gumi) dan Rukun Kampong (Aza) dibentuk, Badan-badan kemasyarakatan ini dinyatakan sebagai badan pemerintah yang terbawah serta berkewajiban turut aktif dalam lapangan pemerintahan. Sejak itu maka mantri PP tidak mungkin lagi mengadakan hubungan langsung dengan penduduk, melainkan harus melalui Aza Yo dan Tomari Gumityo. Rukun Kampung yang pada zaman Belanda merupakan organisasi masyarakat, yang bekerja dalam lapangan sosial, gotong royong, hal kematian, perkawinan, dan lain-lain), pada zaman Jepang Kedudukannya diperkuat, karena pemerintah pendudukan Jepang mengerti benar, bahwa susunan Rukun Kampung terdapat kekuatan-kekuatan potensial untuk membantu usaha-usaha peperangan. Nama Rukun Tetangga disebut Tonari Gumi.⁵

B. Kondisi Pendidikan dan Sosial Budaya

1. Pendidikan

Dibandingkan dengan masa akhir pemerintah Hindia Belanda, pendidikan pada masa pendudukan Jepang sangat menurun sekali. Jumlah Sekolah Dasar dari 21.500 menurun menjadi 13.500, sekolah lanjutan dari 850 menjadi 20. Perguruan tinggi/fakultas terdiri dari 4 buah, yang dapat dikatakan untuk beberapa lama belum

⁵ Tonari Gumi tugasnya dititikberatkan pada upaya untuk membentuk sistem sosial dan ekonomi yang diperlukan dan membantu pemerintah militer Jepang, keberadaannya hampir dapat disamakan dengan Rukun Tetangga pada saat ini. Tonari Gumi di ketuai oleh Ku Mi Co

dapat melakukan kegiatan, jumlah murid merosot 30 %, murid sekolah menengah merosot 90 %. Guru-guru sekolah dasar berkurang 35 % guru sekolah menengah yang aktif tinggal 5 %. Angka buta huruf tinggi sekali.⁶

Pada masa pemerintahan Jepang pendidikan tingkat dasar menjadi satu macam yakni sekolah dasar 6 tahun. Maksud Jepang untuk menyeragamkan Sekolah dasar tersebut supaya mempermudah dalam pengawasannya, baik isi maupun penyelenggaraannya. Ditinjau dari segi pendidikan penyeragaman tersebut malah menguntungkan bagi penduduk, yaitu dengan hapusnya diskriminasi. Sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditujukan kepada keperluan Perang Asia Timur Raya. Pada dasarnya pendidikan melalui sekolah-sekolah ini hendak di-Jepang-kan. Tindakan Jepang dalam memasukkan sistem pendidikan di Indonesia di bidang pendidikan dapat kita lihat diadakannya latihan bagi-bagi guru-guru di Jakarta. Untuk diindoktrinasi dalam Hakko Iciu (kemakmuran Bersama). Guru-guru yang mengikuti latihan di Jakarta terdiri dari atasan-atasan guru daerah. Setelah mereka selesai mengikuti latihan di Jakarta, untuk selanjutnya kembali ke daerah masing-masing untuk memberikan indoktrinasi kepada guru-guru baik di sekolah negeri maupun swasta diharuskan mengikuti latihan indoktrinasi. Lama latihan yang diadakan di Yogyakarta yakni 3 bulan ditambah 3 bulan lagi menjadi 6 bulan, bertempat di sekolah Dasar Negeri Lempuyangan. Sekolah-sekolah pada masa pendudukan Jepang terdiri atas :

- a. Sekolah Umum, yaitu:
 1. Sekolah Rakyat 6 Tahun (Kokumin Gokko)
 2. Sekolah Menengah 3 Tahun
 3. Sekolah Menengah Tinggi 3 Tahun
- b. Sekolah Guru, yaitu :
 1. Sekolah Guru 2 Tahun (Syoto syekan gokko)
 2. Sekolah Guru 4 tahun (Syoto syekan gakko)
 3. Sekolah Guru 6 Tahun (Koto syekan gakko)

Sekolah-sekolah guru tersebut diatur oleh Pemerintah daerah hingga sekarang. Sedang Sekolah rakyat Partikelir disamakan dengan sekolah Rakyat Negeri. Persamaan ini berlaku pula terhadap guru-gurunya. Guru-guru Indonesia di bawah pengawasan Jepang.

⁶ *Ibid.*, hal : 25

Sebagai bahasa pengantar di semua sekolah digunakan bahasa Indonesia dan juga dimasukan sebagai mata pelajaran pokok. Disamping Bahasa Indonesia Bahasa Jepang diberikan sebagai mata pelajaran bahasa daerah kepada murid-murid sekolah kelas 1 dan 2. Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, diawali terlebih dahulu dengan taiko kurang lebih setengah jam, yang didirungi dengan lagu dan disiarkan langsung dari Jakarta. Taiko pagi hari berlaku pada setiap saat di sekolah dan dikantor-kantor. Selain taiko, murid-murid juga diharuskan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo serta melakukan penghormatan (sikere) kearah istana kaisar di Tokyo. Murid juga diharuskan ikut kerja bakti (kinrohoshi), yaitu mengumpulkan bahan-bahan keperluan perang. Menanam bahan makanan, membersihkan asrama, memperbaiki jalan. Selain mendapatkan latihan jasmani juga mendapatkan latihan kemiliteran. Bagi semua guru di samping telah mengikuti latihan juga diwajibkan mengikuti kursus bahasa Jepang diakhiri dengan ujian. Semua itu diberikan oleh Jepang kepada orang-orang Indonesia agar mereka mempunyai semangat Jepang (Nippon Seisyin). Sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan pada masa pendudukan Jepang digunakan oleh Jepang sebagai tempat pendidikan yang bersifat militer dan tempat indoktrinasi.

Segala usaha Jepang telah ditanamkan di bumi Indonesia, seperti halnya di bidang pendidikan, hanyalah untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Oleh pemerintah pendudukan Jepang, sekolah-sekolah swasta diperkenankan dibuka kembali seperti Sekolah Taman Siswa, Sekolah Muhammadiyah. Juga sekolah-sekolah yang diasuh oleh misi atau zending diperbolehkan dibuka kembali dibawah pengawasan pemerintah Jepang.

2. Budaya

Betapa besar hak dan alasan kita mengutuk kejahatan moral dan penindasan kemanusiaan pemerintah Jepang pada waktu itu (1942-1945). Secara berencana pemerintah Jepang memusnahkan kaum intelektual kita dengan jalan hukuman mati. Merendahkan taraf intelektual kita di sekolah-sekolah dengan lebih banyak berbaris dan berkinrohoshi (kerja paksa) di pabrik ataupun dilapangan daripada belajar, serta dalam bidang ekonomi menghisap kebutuhan ekonomi sampai batas kemanusiaan yang paling rendah. Namun dibalik itu ada hal yang berharga yang dapat dipungut oleh bangsa kita yaitu adanya kesadaran dan kepribadian bangsa kita.

Diluar rencana pemerintah Jepang sendiri hendak menindas cita-cita rakyat Indonesia menjadi satu bangsa, alat-alat propaganda Jepang dengan tidak disadari telah

menumbuhkan kesadaran bangsa kita. Dengan tujuan hendak mendapatkan bantuan rakyat Indonesia memerangi pihak sekutu yang terus mengancam kemenangan Jepang di Asia Timur Raya, pada saat-saat awal rakyat Indonesia diperkenankan mengibarkan bendera Merah Putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah sebagai pengganti bahasa Belanda yang dilarang dipergunakan, baik dalam hubungan resmi maupun bahasa pergaulan. Hingga akhirnya Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia menjelang kealahannya dalam perang Pasifik. Hal itu telah mendorong kesadaran kebangsaan Indonesia yang beratus-ratus tahun terbelenggu di bawah penjajahan bangsa-bangsa pendatang Eropa: bangsa Portugis, Inggris dan Belanda.

Keadaan hampir serupa dengan peristiwa lahirnya pergerakan kebangsaan Indonesia yang dipelopori oleh Budi Oetomo pada tahun 1908, antara lain mendapat ilham dari kemenangan Jepang atas Rusia dalam peperangan 1904-1905.

Tetapi kalau kesadaran kebangsaan yang berkembang di Jaman Belanda masih terbatas pada umumnya bersifat kolonial burgerlijk, sikap penduduk jajahan yang hanya mengingat kepada keselamatan kedudukannya sebagai pegawai kantor, pangreh praja, atau buruh upahan. Maka pada jaman Jepang kesadaran kita merupakan satu bangsa yang mempunyai watak serta kemauan kepribadian sendiri telah merata ke seluruh anggota masyarakat. Kesadaran kebangsaan itu terpupuk oleh propaganda Jepang dan hasil kemenangan Jepang yang memperlihatkan superioritas bangsa Asia di atas bangsa Eropa di dalam peperangan. Tetapi tidak sedikit pula terbit dari kebencian kita yang mendalam terhadap penindasan pemerintah Jepang.

Jaman Jepang ini merupakan masa persiapan bagi pertumbuhan seni dan budaya setelah kemerdekaan nanti. Bangsa Belanda yang diusir balatentara Dai Nippon, pelindung dan pemimpin Asia Raya itu berarti lenyapnya kebudayaan Belanda yang selama 350 tahun telah mempengaruhi rakyat Indonesia. Hal ini dapat kita ketahui dari propaganda Jepang dengan sembojannya:” saya belajar bahasa Nippon. Saya berbahasa Indonesia, saya tidak berbahasa Belanda. Musuh Nippon berarti juga musuh bangsa Indonesia. Musuh-musuh yang selekas mungkin harus dihancurkan yakni Amerika dan Inggris. Kemenangan Balatentara Dai Nippon berarti kemenangan bangsa Indonesia pula. Oleh karena itu kita harus berani berkorban sebesar-besarnya di bawah pimpinan Dai Nippon, untuk mencapai cita-cita kemakmuran bersama dalam lingkungan Asia Timur Raya.

Kota Yogyakarta adalah pusat pengajaran, kesenian, kebudayaan dan adat istiadat Jawa asli yang tinggi derajatnya. Pengakuan ini pernah pula diucapkan oleh pembesar urusan umum Yogyakarta Koti Zimu Kyoku yakni Yoshikawa. Ternyata ucapan Yosyikawa ini menjadi kenyataan hingga saat ini, setiap orang ingin memperdalam pengetahuannya tentang kebudayaan Jawa, tentu tak akan melalaikan Yogyakarta.

Pemerintah Jepang dalam menanggapi kehidupan seni dan budaya tidak mementingkan kedudukan sosial, tinggi rendah nilainya tidak pula ditentukan olehnya. Nilai seni dan budaya hanya ditentukan oleh tinggi rendahnya kehidupan intelektual yang mendasari. Sekalipun pemerintah Jepang telah mengabaikan dan memerosotkan pendidikan terutama di sekolah rendah dan menengah. Tetapi karena sikap yang tidak mengutamakan kepatuhan kedudukan masyarakat yang dipakai menilai pilihan lapangan hidup, maka pelajar yang telah cukup umur tidak segan-segan lagi bekerja dan berpikir dalam lapangan seni budaya yang telah menjadi panggilan hidupnya.

Selain bidang seni dan budaya yang telah disebutkan di atas juga dibidang olah raga pada jaman Jepang dimajukan seperti misalnya sepak bola, gerak jalan, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan seruan dari kepala propaganda yaitu Tuan Syuda, yang menyerukan agar di setiap karesidenan bidang olahraga juga harus dimajukan. Di Yogyakarta latihan-latihan olah raga tersebut diadakan di lapangan-lapangan Kridosono dan ASRI.

C. Kondisi Ekonomi

Seperti yang didengungkan oleh barisan propaganda Jepang yakni kemenangan terakhir dalam peperangan nanti adalah untuk membentuk kemakmuran bersama di lingkungan Asia Timur Raya. Maka untuk mencapai kemenangan itu, harus didasari dengan kekuatan rakyat. Berhubung rakyat sedikitnya 80 % kaum tani, maka kekuatan rakyat dapat dicapai dengan cara meningkatkan produksi pangan. Peningkatan produksi pangan ini memerlukan perbaikan pula dalam pengolahan tanah. Untuk itu maka pemerintah Jepang dibuatlah suatu program penambahan bahan-bahan makanan dan hasil bumi lainnya dalam jangka waktu lima tahun. Rencana tersebut dibuat oleh Gunseikan di Jakarta. Untuk rakyat Yogyakarta Syu, bahan makanan yang penting yaitu beras, ketela, jagung, gaplek yang merupakan makanan sehari-hari penduduk di Gunung Kidul. Sedangkan jagung menjadi makanan sehari-hari penduduk di lereng Merapi dengan demikian yang dimaksud

dalam rencana lima tahun peningkatan bahan makanan itu adalah beras, jagung dan ketela (gaplek).⁷

Yogyakarta syu pada waktu itu memiliki 1.800.000 jiwa dan mempunyai sawah 65.000 ha dan tanah kering 180.000 ha maka sudah selayaknya kalau di Yogyakarta digunakan sebagai proyek peningkatan hasil pertanian. Rencana peningkatan produksi pangan ini dilaksanakan oleh Noji Shorei Kyoku yang telah mendapat persetujuan dari pembesar ekonomi P. Tn. Tyokan Kakka; direncanakan hasil padi di Yogyakarta akan bertambah sedikitnya 30 % dengan tanpa adanya tambahan luas lahan, Pemerintah Jepang selalu menganjurkan kepada petani untuk bekerja lebih giat, jangan bercocok tanam untuk keperluan sendiri saja tetapi juga untuk kepentingan masyarakat.

Dalam kenyataannya semua hasil usaha para petani itu, hanyalah untuk memenuhi kebutuhan perang pemerintah Jepang. Kualitas pembuatan gaplek ditingkatkan, dengan kualitas yang meningkat itu gaplek menjadi lebih tahan lama dan harganya juga meningkat, gaplek tidak hanya dijual di Yogyakarta syu tetapi juga dijual ke luar daerah. Jagung juga di upayakan terdapat peningkatan kualitas dengan pemilihan bibit yang baik, Jagung dari Yogyakarta dikirim ke wilayah syu lain, sehingga Yogyakarta mendapatkan tambahan income dan dilain syu ada tambahan bahan makanan. Dengan peningkatan kualitas bibit hasil pertanian jagung meningkat sekitar 20%.

Selain ketiga bahan makanan pokok tersebut, dianjurkan pula oleh Pemerintah Jepang untuk menanam kacang tanah, kedelai putih yang sangat baik hasilnya. Penanaman kedua jenis tanaman itu untuk menambah pendapatan keuangan Yogyakarta syu, karena kedua hasil tanaman itu dijual ke daerah lain. Tempat penanaman kedua jenis tanaman itu adalah Gunung Kidul. Selain usaha-usaha pemerintah Jepang untuk meningkatkan hasil pertanian juga digalakan pula peningkatan hasil perikanan sesuai anjuran Noji Shoeri Kyoku kepada para petani agar juga memajukan pemeliharaan ikan di sawah dan dikolam-kolam. Dalam daerah Yogyakarta hanya tempat-tempat yang mendapat saluran air dari Kali Progo yaitu Godean dan Pandak Gun. Hasil pemeliharaan ikan tersebut rata-rata adalah 60 kg perhari dalam 1 ha sawah selama 80 hari. Pemeliharaan ikan bersama-sama dengan padi di sawah. Menurut P Tn. Tyokan Kakka memerintahkan kepada para Pangreh Praja supaya memperhatikan dan membantu sebaik-baiknya di dalam usaha pemerintah Jepang meningkatkan produksi pangan.

⁷ *Ibid.*, hal 31

Bagi Yogyakarta Syu, tanaman yang memberikan hasil banyak kepada penduduk yaitu pohon kelapa, hasil kelapa dan gula kelapa lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri, lagi pula dapat dijual keluar daerah. Penghasilan dari kelapa di dalam Yogyakarta Syu adalah sebagai berikut : minyak kelapa f. 1.750/ hari dan gula kelapa f 2.000/ hari. Selain hasil kelapa itu Yogyakarta juga mempunyai perusahaan gula, rami, tembakau, batik, emas, perak dan logam-logam lain yang banyak memberikan penghasilan kepada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan peperangan pemerintah Jepang melancarkan propaganda seperti yang dikatakan Menteri Asia Timur Raya, P.J.M. Kasno Hoki, bahwa pembangunan ekonomi Asia Timur Raya tidak hanya ditujukan untuk melaksanakan susunan ekonomi baru, tetapi juga untuk dapat membantu terciptanya susunan dunia baru. Berbagai usaha dilakukan agar supaya Asia Timur Raya dapat memenuhi keperluannya dengan memperkokoh kekuatan ekonomi, kekuatan tenaga dan sumber-sumber bahan di seluruh Asia Timur Raya.

Masyarakat daerah Yogyakarta turut pula menyerahkan tenaga produksi dari produksi dari perusahaan dan kerajinan rakyatnya guna kepentingan peperangan. Kegiatan ini dapat kita lihat pada rakyat di sekitar Pengasih (Kulon Progo Ken, Yogyakarta Ko Koti) dan di sekitar Brosot (Adikarto Ken Paku Alaman-Ko Koti) yang banyak memproduksi benang, tampar, dadung, tali sauh/tali jangkar) dan sebagainya, dari serat kelapa dan sisal. Kerajinan serat kelapa dan pabrik tali di Pengasih membutuhkan pekerja sebanyak kurang lebih 1000 orang, sedangkan di Brosot 500-650 orang. Kerajinan rakyat di sekitar Sentolo (Kulon Progo Ken) menghasilkan tikar dan karung dari bagor agel (corypka utan). Tikar-tikar tersebut digunakan untuk alat pembungkus pada perusahaan ataupun pabrik-pabrik. Selain tikar bagor agel juga dihasilkan tikar dari lulub dari serat pohon waru, tikar ini dapat digunakan sebagai bahan layar perahu, sehingga permintaan tikar jenis ini banyak dari daerah-daerah dari luar Jogya seperti Jawa Timur. Tikar lulup itu dihasilkan oleh perajin dari Sanden Son dan Lendah Son. Sementara itu hasil kerajinan tikar mendong dan pandan yang dihasilkan Godean Gun diperuntukan keperluan tentara Jepang.

Usaha pertenunan desa di Moyudan Son (Godean Gun) dibawah pimpinan Aburisman selaku pimpinan bagian tenun dari Yogyakarta Kugyo-Sodan-Dyo telah berhasil membuat perbangaas. Dari Jawatan Kesehatan Kota Jakarta, perbangaas ciptaan Yogyakarta itu dapat perhatian besar. Perbangaas tersebut sempat pula dipamerkan dalam Pasar Malam Rakutenei Jakarta di Gedung Putra.

Pembuatan karung goni dari sisal yang berpusat di Demak Ijo diusahakan oleh Nanyo Saji Kabushiki Kaisha dan mendapat bantuan dari Yogyakarta Koti Zimu Kyoku Keizaibu. Pembuatan karung ini dengan alat-alat tenun di pabrik Demakijo dan di perusahaan-perusahaan tenun yang ditunjuk permintaan benang sisal yang diperlukan dikerjakan dengan tenaga tangan dengan mempergunakan alat pemintalan sederhana di beberapa perusahaan pemintalan benang di dalam kota, di desa-desa di Godean, Moyudan, Pedes, Pengasih, Gamping. Tali serta hasil kerajinan Yogyakarta ini juga mendapatkan pasaran di luar daerah. Oleh karena itu Kaiyo Gyogyo Kenkyusho Tyo (Pembesar Jawatan Penyelidikan Perikanan Laut) tali serat kelapa hasil kerajinan Yogyakarta tersebut dinilai baik, rapi dan kuat. Tali tersebut banyak dipakai dilaut sebagai tali sauh, tali pengikat perahu, dan lain-lain. Selain dari hasil-hasil kerajinan tersebut diatas, masih ada banyak hasil perusahaan kerajinan yang dikeluarkan atau diproduksi di daerah Yogyakarta.

Sebagai alat transportasi pada Jaman Jepang, oleh penduduk Yogyakarta dan sekitarnya digunakan alat angkutan seperti gerobak, sepeda yang memakai ban karet mati, dan kuda. Alat angkutan tersebut digunakan untuk mengangkut bahan-bahan hasil bumi, misalnya beras, minyak kelapa, dan bahan-makanan lainnya. Pada saat itu ada juga alat angkut lainnya yang berupa kendaraan-kendaraan yang digunakan sebagai alat angkut untuk keperluan perang. Walaupun pada kenyataannya alat angkut tersebut juga untuk mengangkut hasil bumi dan bahan-bahan lainnya guna keperluan perang.

Dengan dalih untuk meningkatkan kemakmuran rakyat didaerah pemerintah Jepang mengadakan peningkatan produksi. Tetapi dalam prakteknya hasil peningkatan produksi itu untuk kebutuhan rakyat sendiri masih kurang, dan sesungguhnya hasil hasil pertanian dan produksi itu tidak lain adalah untuk keperluan perang Asia Timur Raya.

Dengan demikian rakyat Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya tidak pernah ikut serta menikmati hasil kerjanya. Sementara itu tekanan penghidupan rakyat semakin keras. Pihak balatentara Jepang mengangkut beras dan jagung untuk dikirim ke medan perang. Kewajiban untuk memasukkan padi kepada pemerintah yang lazim disebut dengan "jatah padi" sangat menekan rakyat tani di desa-desa. Pasar-pasar sepi tidak ada orang menjual beras dengan terang-terangan, karena jika menjual melebihi penetapan harga resmi akan disita. Padahal harga resmi tak akan ditaati karena sangat rendah.

Kesukaran bahan makanan ini disusul dengan kesukaran bahan pakaian. Bahan pakaian juga membubung tinggi, meskipun toko-toko buka tetapi tidak ada barang, semua lari ke pasar gelap. Kemudian dibentuk polisi ekonomi yang bertugas mengawasi harga-harga barang. Namun pada prakteknya pengawasan itu menyebabkan timbulnya suap-

menyuap dan korupsi. Pemerintah Jepang menyerahkan urusan distribusi dan peredaran barang tersebut kepada pamong praja dan Tonari Gumi. Kondisi itu semakin memperparah keadaan dengan merajalelanya korupsi, suap-menyuap, penipuan. Penyakit korupsi ini semakin merajalela di dalam jawatan-jawatan resmi ataupun setengah resmi yang diserahkan kepada bangsa Indonesia sehingga pada akhirnya pada saat itu terjadilah inflasi yang cukup besar.

Harga bahan makanan dan pakaian membumbung tinggi. Terdapat banyak kasus penyelundupan, polisi bekerjasama dengan pedagang. Situasi ekonomi sangat sulit dapat digambarkan dengan banyaknya pengemis dan banyak masyarakat yang sakit hongerioidim (busung lapar). Banyak rakyat yang bercelana bagor dan makan bekicot. Kondisi itu masih diperparah dengan kewajiban bagi masyarakat untuk menanam kapas dan jarak yang mana dua tanaman itu sangat dibutuhkan untuk mendukung peperangan pihak bala tentara Jepang.

BAB III PEMBANGUNAN SELOKAN MATARAM

Selokan Mataram merupakan sebuah selokan yang mengalir membujur dari arah barat menuju ke arah timur. Jika diturut aliran selokan tersebut dari timur tempat masuknya air dari selokan tersebut ke Sungai Opak¹ kearah barat, maka akan sampai pada sebuah titik dimana akhirnya aliran air tersebut bercabang. Salah satu cabangnya adalah mengalir kearah selatan yang dikenal dengan Selokan Van Der Wijk.² Jika air tersebut diturut sampai pada hulunya akan ditemui sebuah bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Karang Talun³. Bendungan tersebut merupakan pintu air dari Sungai Progo.

Cukup besar debit air yang mengalir di Selokan Mataram tersebut. Dengan panjang aliran kurang lebih 30 km dan menghubungkan dua buah sungai besar yaitu Sungai Progo di hulu dan Sungai Opak di muara, Selokan Mataram mampu memberikan suplai air untuk lahan pertanian di wilayah Yogyakarta seluas kurang lebih 15.734 ha.⁴

Terkait dengan keberadaan Selokan Mataram, muncul sebuah mitos bahwa Sunan Kalijaga pernah menyampaikan pernyataan bahwa Yogyakarta akan subur dan makmur jika dua buah sungai besar yaitu Progo dan Opak dapat bersatu. Hal tersebut mungkin ada benarnya, namun kedua sungai itu bukan bersatu secara alami melainkan disatukan dengan saluran air. Kenyataannya, warga Yogyakarta sekarang lebih makmur daripada sebelum adanya Selokan Mataram dan selokan itu telah mengairi ribuan hektar lahan pertanian yang sampai saat ini masih menghijau pada saat musim kemarau. Selokan Mataram berhasil mengawinkan atau menyatukan Sungai Progo dan Sungai Opak.⁵

Bagi sebagian besar masyarakat Yogyakarta, keberadaan Selokan Mataram mungkin tidak asing lagi. Apalagi bagi mereka yang berdomisili di daerah Sleman. Namun tidak banyak yang tahu tentang bagaimana sejarah Selokan Mataram. Sejarah Selokan Mataram tidak dapat dilepaskan dari Sejarah Kasultanan Yogyakarta, khususnya pada periode pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang naik tahta pada hari Senin Pon tanggal 8

¹ Muara tempat masuknya air ke Sungai Opak terletak di Dusun Kowang, Desa Kalasan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Mohammad Syafrudin, *Selokan Mataram Kajian Terhadap Sistem Irigasi Dan Dampak Sosial Lingkungannya*, (Yogyakarta : Sekripsi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 2001) : hal : 47

² Aliran air yang mengalir kearah selatan tersebut dikenal dengan nama Selokan Van Der Wijk yang berada di Dusun Macanan, Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. *Ibid.*

³ Bendungan Karang Talun dan Selokan Van Der Wijk meruakan sarana irigiasi di Wilayah Yogyakarta yang dibangun pada sekitar tahun 1909. *Ibid.*, hal : 43

⁴ Gagasan Dasar Kaliprogo, dalam *Ibid.*, hal : 47

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Selokan_Mataram

bulan Sapar tahun Jawa Dal 1871, atau dalam kalender masehi bertepatan dengan tanggal 18 Maret 1940.⁶

Perjanjian Kalijati yang berlangsung di Subang, Jawa Barat pada tanggal 9 Maret 1942 menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia.⁷ Sebagai gantinya adalah masuk tentara pendudukan Jepang yang berhasil menjajah Indonesia dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Meski hanya selama tiga setengah tahun, namun dampak yang ditimbulkan sungguh luar biasa. Penderitaan yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia justru lebih berat dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda yang berlangsung kurang lebih tiga setengah abad.

Masa pendudukan tentara Jepang berlangsung sejak tahun 1942 sampai dengan 1945. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama kurang lebih tiga setengah tahun tersebut, Jepang telah meninggalkan beban penderitaan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Seluruh potensi dana dan daya yang ada di Indonesia dieksploitasi oleh Jepang guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana militernya.⁸ Hal ini dilakukan sebagai usaha Jepang untuk memenangkan Perang Pasifik melawan Sekutu.

Untuk menarik simpati rakyat langkah pertama yang diambil Jepang adalah mendirikan Gerakan Tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia)⁹. Gerakan tersebut didirikan pada tanggal 29 April 1942 dibawah pimpinan seorang nasioanalis yang kurang terkenal bernama Mr. Syamsuddin. Waktu itu Jepang belum memandang perlu melibatkan orang Indonesia. Hal ini karena optimisme Jepang akan keberhasilannya dalam berbagai pertempuran pada awal tahun 1942. Namun ketika Jepang mulai mengalami kekalahan dalam pertempuran di Laut Karang tanggal 7 Mei 1942, minat untuk melibatkan dan menjalin kerjasama dengan bangsa Indonesia semakin besar. Oleh karena itulah dibentuk

⁶ Atmakusumah, *Tahta Untuk Rakyat Celah-Celah Kehidupan Sultan Hemengku Buwono IX*, (Jakarta : PT. Gramedia, Jakarta, 1982) hal : 48

⁷ Pemerintah Belanda mengambil keuntungan dari peristiwa ini, karena waktu itu yang menyerah adalah angkatan perang Belanda yang diwakili oleh Jenderl Terpoorteen dan bukan Gubernur Jenderal Tjarda, sehingga yang menyerah hanyalah angkatan perangnya bukan pemerintah Belanda. Disamping itu pemerintah Belanda masih tetap berjalan dengan *exile govermet* (pemerintahan pelarian) dibawah H. J. Van Mook dalam bentuk NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) di Brisbae Australia. Lihat Moedjanto,; *Indonesia Abad Ke 20 Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati Jilid I*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisus, 1989), hal : 72

⁸ Penderitaan rakyat yang begitu berat ini dikisahkan dalam Film yang berjudul *Romusa* tahun 1973 arahan Sjumandjaya namun tidak jadi diputar karena dilarang pemerintah Indonesia pada masa orde baru. Mengapa film tersebut dilarang beredar, hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut dari . <http://id.wikipedia.org/wiki/Romusa>

⁹ Gerakan Tiga A ini bubar menyusul berdirinya organisasi politik baru yang dikenal dengan Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang diketuai oleh Sukarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara, Kyai Haji Mas Mansur (empat serangkai) pada bulan Maret 1943. Bulan Januari 1944, Putera digantikan dengan organisasi Jawa Hokokai (persatuan kebaktian Jawa) sebagai alat mobilisasi pendudukan Jawa. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since C. 1200 Third Edition*, terjemahan Satrio Wahono et.al., (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2005), hal : 415 dan 419

berbagai organisasi massa antara lain : *Seinendan* (barisan pemuda) pada bulan April 1943, *seinentai* (barisan murid-murid sekolah dasar), *Gakukotai* (barisan murid-murid sekolah lanjutan), *Fujin-Seinentai* (barisan gadis-gadis), *Fujinkai* (barisan wanita), *Keibodan* (barisan cadangan polisi) pada bulan April 1943, *Heiho* (barisan cadang prjurit / militer) pada pertengahan tahun 1943, dan *Romusa* (barisan pekerja / pekerja paksaan).¹⁰ Program untuk melibatkan rakyat Indonesia ini sebenarnya adalah untuk menggalang dana dan daya bagi Jepang untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana militer Jepang guna memenangkan perang melawan Sekutu dalam Perang Pasifik.

Aspek yang paling runyam dan kejam dari pendudukan tentara Dai Nippon adalah penderitaan yang dialami para *romusa*, dan tindakan kekerasan seksual kepada kaum perempuan. Penggunaan *romusa*, yang dipropagandakan sebagai “prajurit ekonomi” itu, agaknya dimulai tanpa rencana pada awal zaman pendudukan, melalui organisasi Putera yang dipimpin oleh Soekarno itu. Tetapi baru pada tahun 1944 telah diorganisasi dan bahkan dilembagakan dengan pembentukan *Romukyoku* (kantor urusan pekerja) di dalam lingkungan *Naimubu* (departemen urusan dalam negeri). Soekarno sendiri bahkan ikut menjadi pelopornya, dengan mendaftarkan dirinya sebagai *romusa*.¹¹

A. Romusa Di Yogyakarta

Romusa (*rōmusha* : “buruh”, “pekerja”) adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Sebagian besar anggota *romusa* adalah petani. Sejak bulan Oktober 1943 pihak Jepang mewajibkan para petani untuk menjadi *romusa*. Secara pasti jumlah orang Indonesia yang dikirim sebagai *romusa* tidak diketahui secara pasti. Namun menurut perkiraan mereka berjumlah sekitar empat sampai sepuluh juta orang. Mereka dikirim untuk bekerja menyediakan sarana dan prasarana militer tentara Jepang baik di wilayah Indonesia maupun di daerah Asia Tenggara yang diduduki pasukan Jepang.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *romusa* adalah orang-orang yang dipaksa bekerja berat pada zaman pendudukan Jepang, pekerja paksa. Meromusakan sama dengan menjadikan *romusa*, memaksa bekerja berat.¹³

¹⁰ Moedjanto, *Op.Cit*, hal : 81.

¹¹ Suryana Sudrajat, *Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan : Sebuah Discourse Dalam Sejarah Indonesia Modern* dlm <http://suryanasudrajat.wordpress.com>

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Romusa>

¹³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hal : 961

Apapun dan bagaimanapun itu *romusa*, yang jelas proyek tentara pendudukan Jepang tersebut telah meninggalkan kenangan pahit bagi bangsa Indonesia. Bahkan karena sangat berat penderitaan seorang *romusa* pada jaman pendudukan Jepang, bagi orang Jawa kata *romusa* sering diplesetkan menjadi *remuk rusak*.¹⁴

Munculnya proyek *romusa* pada masa pendudukan tentara Jepang karena dilatarbelakangi oleh keadaan Jepang dalam Perang Pasifik. Memasuki tahun 1943 kedudukan pasukan Jepang mulai berbalik dari posisi sebagai pihak penyerang menjadi pihak yang bertahan. Pada saat itu Jepang mulai sadar bahwa penggalangan daya dan dana harus segera diusahakan. Dari kacamata tentara Jepang bahwa wilayah Jawa adalah daerah kaya akan sumber daya manusia karena jumlah penduduknya yang padat. Sedangkan untuk daerah luar Jawa kaya akan sumber alam. Oleh karena itu diadakanlah perjanjian antara Angkatan Darat Jepang di Jawa (AD ke 16) dan penguasa Angkatan Laut (AL) di Makasar bahwa pemasokan tenaga kerja dari Jawa ke wilayah bekas Hindia Belanda yang diduduki AL Jepang, diatur sebagai berikut :

1. Rencana pemasokan tenaga kerja harus diperbaharui setiap setengah tahun.
2. AL harus membayar AD sebesar *f* 5 per *romusa* untuk menutup seluruh biaya yang diperlukan bagi pengerahan dan transportasi.
3. Upah awal seorang *romusa* harus sebesar *f* 0,50 per hari dan kontrak kerja harus berlaku selama satu tahun.
4. AL harus memberikan sarana perumahan bagi *romusa*.
5. *f* 3 harus diambil setiap bulan dari upah seorang *romusa* untuk dikirim kepada keluarganya.¹⁵

Menanggapi adanya perjanjian tersebut, dalam sidangnya yang pertama *Tyuuu Sangi-in*¹⁶ memberikan saran-saran pengerahan *romusa* tersebut, sebagai berikut :

1. *Tyuuu Sangi-in* menganjurkan pembentukan badan-badan yang memotivasi rakyat dengan suka rela bekerja di luar daerahnya sendiri untuk mempercepat tercapainya kemenangan akhir.

¹⁴ Suwarno, *Romusa Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta : Penerbitan Universitas Sanata Dharma, 1999), hal 4

¹⁵ *Ibid*, hal 10

¹⁶ Tyuuu Sangi-in merupakan Dewan Penasehat Pusat yang diketuai oleh Sukarno. Dewan ini dibentuk di Jakarta Untuk tingkat daerah dibentuk Shu Sangi-kai. Lihat Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since C. 1200 Third Edition*, terjemahan Satrio Wahono et.al., (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hal : 417. Di Yogyakarta tidak dibentuk Kooti Sangi – kai, tetapi Sultan HB IX diberi wewenang untuk mengusulkan dua anggota Tyuuu Santi-in. Lihat Suwarno, *Hamengkubuwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1994) hal : 116. Tyuuu Sangi-in mirip suatu badan yang mirip dengan Volkraad dulu. Dalam Tyuuu Sangi-in, Sukarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil. Lihat Moedjanto, *Op.Cit.*, hal : 76

2. Badan ini harus bekerjasama dengan bupati, wedana, camat dan kepala desa.
3. Badan-badan itu akan mengobarkan semangat bekerja rakyat di perusahaan-perusahaan bala tentara Jepang dengan suka rela.
4. Untuk mencukupi kebutuhan tenaga kerja yang banyak dan mendesak harus segera diadakan pendaftaran orang-orang yang rela bekerja di tanah Jawa di luar karesidenannya sendiri dan di luar Jawa.
5. Dalam mencari buruh itu harus diberitahukan perjanjian yang nyata dan resmi kepada mereka.
6. Badan-badan itu harus menjamin sampainya pengiriman uang dan lain sebagainya kepada keluarga yang ditinggalkan. Kalau keluarga yang ditinggalkan itu menderita kesulitan badan-badan tersebut harus membantu mengatasinya, sehingga para buruh itu tidak khawatir di tempat kerjanya.
7. Pada saat-saat tertentu badan-badan itu akan mengirim pegawai daerah asal pekerja itu untuk memperhatikan keinginannya.
8. Biaya badan-badan itu akan dibantu oleh *Gunseikanbu*.¹⁷

Peraturan mengenai mobilisasi *romusa* sebenarnya tidaklah terlalu buruk. Ia bersifat suka rela bagi laki-laki berusia 16-20 tahun, dan perempuan yang berumur 16-25. Tetapi, pada prakteknya, mereka tidak hanya dipekerjakan di Indonesia tetapi juga di negeri-negeri Asia Tenggara. Tanpa sama sekali mengabaikan kesejahteraan, para romusa telah dipaksa bekerja membuat jalan-jalan, lapangan udara, pelabuhan laut, atau merawat perkebunan atau melakukan tugas-tugas lain bagi kelancaran jalannya roda peperangan Jepang.¹⁸ Namun dalam kenyataannya bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang telah ada sejak jaman pendudukan Jepang 1942-1945, mendengar kata romusa merasa merinding dan ngeri. Dalam perkataan Jepang, romusa dapat diartikan sama dengan kuli pada jaman penjajahan Belanda. Namun nasib para romusa ini jauh lebih jelek dari mereka yang melaksanakan tugas sebagai kuli pada jaman penjajahan Belanda.¹⁹

Pada tahun 1942 Yogyakarta *kooti* terbagi menjadi empat kabupaten yaitu Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul dan Kulonporgo.²⁰ Namun pada tahun 1945 Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas Kotapraja Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten

¹⁷ Kan Poo (Berita Pemerintah) No. 30 Tahun II Boelan 11-2603, dalam Suwarno, *Romusa Daerah Istimewa Yogyakarta, Op. Cit*, hal 12

¹⁸ Suryana Sudrajat, *Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan : Sebuah Discourse Dalam Sejarah Indonesia Modern* dlm <http://suryanasudrajat.wordpress.com>

¹⁹ Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1993), hal : 954

²⁰ Suwarno, *Op.Cit*, hal 13

Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul.²¹ Dari pembagian tersebut Kotamadya Yogyakarta mempunyai ciri kekotaan, sedangkan empat kabupaten lainnya yaitu Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul memiliki ciri kedesaan. Pada tahun 1944 dari jumlah penduduk DIY sebanyak 1.818.814 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar adalah rakyat pedesaan. Kebanyakan mereka adalah petani dan pengrajin tradisional. Mereka rata-rata memiliki tanah pertanian yang relatif sempit. Ketika menunggu masa panen, mereka banyak tersisa waktu untuk tidak mengerjakan apa-apa, sehingga dikategorikan banyak menganggur. Lain dengan mereka yang berada di perkotaan yang banyak melakukan aktivitas karena kebanyakan mereka berkerja dalam bidang jasa, perburuhan, dan pegawai negeri. Oleh karena itulah maka *romusa* banyak diambilkan dari penduduk di pedesaan.²²

Menyimak dari apa yang dinasehatkan *Tyuu Sangi-in* (dewan penasehat), maka pengurusan pengerahan *romusa* itu dibebankan kepada pejabat pangreh praja setempat mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sebagai penguasa Yogyakarta *Kooti* (daerah istimewa), yang membawahkan bupati (*kentyoo*), wedana (*guntyoo*), camat (*sontyoo*), sampai perangkat desa dan ketua RT (*kumityoo*).²³

Setiap *kentyo* (bupati) memerintahkan *sontyoo* (camat) untuk mengorganisasi para *kutyoo* (lurah)²⁴ mengerahkan warga desanya untuk menjadi *romusa*. Setiap *kutyoo* diberi jatah tertentu. Kemudian kepala desa memerintahkan *jagabaya* atau *kumityoo* (ketua rukun tetangga) mendatangi warga-warga desa yang dikerahkan menjadi *romusa*. Setiap keluarga diwajibkan menyerahkan satu orang yang masih muda dan kuat²⁵ untuk dijadikan *romusa*. Lurah mengirim perangkat desa (biasanya *jagabaya*) mendatangi calon *romusa* untuk menyampaikan perintah kepala desa agar anggota keluarga yang didatangi itu bersedia menjadi *romusa*. Saat itu juga dia diajak ke tempat kepala desa. Kemudian bersama dengan teman-teman lainnya yang telah berkumpul mereka dibawa ke kapanewon (kecamatan). Selanjutnya dari kapanewon mereka dibawa ke Gowongan dekat Stasiun Tugu Yogyakarta yang waktu itu dijadikan tempat penampungan sementara. Selanjutnya mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok untuk dikirim ke tempat tugas

²¹ *Ibid*, hal : 135.

²² *Loc. Cit*

²³ *Ibid*, hal : 14

²⁴ Pada tahun 1944 dalam Jogja Ko Kooti terdapat 752 Kutyo. Menurut rencana mereka akan dilatih mengenai pelajaran tentang pekerjaan mereka sehari-hari dan pengetahuan umum. Lihat *Tjahaya*, Rebo 15 Sangatu 2604, 20 Mauled 1363 – 1875.

²⁵ Kebanyakan para anggota *romusa* berusia produktif. Sebagian besar mereka berumur dibawah tiga puluh tahun. Separoh dari mereka berumur 12 – 19 tahun, dan separohnya lagi berumur 20 – 30 tahun. Mereka yang berumur diatas 30 tahun sangat sedikit sekali. *Loc. Cit*.

dengan menggunakan kereta api. Disamping itu para calon *romusa* ada juga yang diambil dari tempat kerjanya. Biasanya mereka diambil dari sawah tempat mereka bekerja langsung dibawa ke tempat kepala desa terus diberangkatkan. Untuk minta izin keluarga saja mereka tidak diperbolehkan.²⁶

Bagi mereka yang masuk menjadi anggota *romusa* di Yogyakarta terdapat beberapa cara. *Pertama*, karena adanya perintah. Perintah itu datang dari kepala desa dengan perangkatnya. Mereka sebenarnya enggan untuk melaksanakan perintah tersebut, namun takut untuk menolaknya. *Kedua*, mereka dipaksa untuk masuk sebagai *romusa* sehingga mau tidak mau mereka harus bersedia. Bagi yang akan direkrut menjadi *romusa* di Yogyakarta mereka yang tidak bersedia ditakut-takuti akan dikirim keluar Yogyakarta. *Ketiga*, mereka merasa ditipu. Mereka disuruh datang ke kelurahan, selanjutnya diberangkatkan sebagai anggota *romusa*. Bahkan untuk minta izin keluarga saja dilarang. *Keempat*, mereka yang secara sukarela masuk menjadi anggota *romusa*. Alasan mereka sangat sederhana yaitu mencari pekerjaan dan mencari pengalaman.²⁷

Di Yogyakarta, para *romusa* setelah dikumpulkan oleh para lurah dari desanya, setelah terpenuhi jumlah yang diinginkan dikumpulkan di Gowongan bersama dengan para calon *romusa* dari desa-desa lain. Di Kampung Gowongan tersebut terdapat sebuah tempat milik pemerintah yang dikenal dengan *Wilasapraja*. Ditempat itulah para *romusa* dikumpulkan sambil menunggu pemberangkatan ke tempat yang telah ditentukan oleh Jepang. Dipilihnya kampung Gowongan untuk menampung para *romusa* dengan pertimbangan bahwa kampung tersebut berdekatan dengan stasiun kereta api jurusan Jakarta – Surabaya. Demikianlah, peran kampung Gowongan sebagai saksi sejarah pengerahan *romusa* di Yogyakarta yang dimulai sejak pertengahan tahun 1943.²⁸

Di penampungan Gowongan, para *romusa* selanjutnya didaftar, setiap orang dicatat namanya, dusunnya, dan kelurahannya. Juga diperiksa kesehatannya termasuk mata, dada, dan kemaluannya oleh seorang dokter. Bagi mereka yang kedapatan kurang sehat dipulangkan dan yang sehat disuruh tinggal dalam penampungan. Mereka menunggu pemberangkatan selama satu sampai sembilan hari. Selama menunggu mereka mendapat jatah makanan berupa nasi bungkus dengan lauk yang berbeda-beda. Namun ada juga yang mendapat jatah makanan dari gogik. Ini menunjukkan bahwa dapur penyedia makan untuk *romusa* ini tidak hanya satu. Setelah jumlah mereka dianggap cukup mereka

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, hal : 15

²⁸ *Ibid* , hal : 28

diberangkatkan. Sekali berangkat dengan jumlah 500 – 1.000 lebih.²⁹ Selain dari stasiun Gowongan (stasiun Tugu), para *romusa* diberangkatkan juga melalui Stasiun Lempuyangan. Dari Kepatihan untuk mengikuti upacara pemberangkatan, para *romusa* berjalan kaki menuju Stasiun Lempuyangan untuk dikirim ke Jakarta (Manggarai).³⁰

Dari Gowongan tersebut para *romusa* dari Yogyakarta dan daerah lain dikirim ke luar DIY secara berkelompok. Mereka yang dikirim ke Banten, Sumatra dan Singapura lewat Jakarta. Sedang yang dikirim ke Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku lewat Surabaya.³¹

Bagi *romusa* yang berasal dari Yogyakarta, PJ. Suwarno dalam bukunya yang berjudul ***Romusa Daerah Istimewa Yogyakarta***, Penerbitan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 1999, pengiriman *romusa* digolongkan menjadi empat kelompok :

1. Mereka yang dikirim ke proyek-proyek di lingkungan DIY. Proyek-proyek tersebut antara lain :

a. Badug,

Badug terletak di desa Wonocatur dekat lapangan terbang Adisucipto sekarang (dulu Maguwo). Di tempat ini para *romusa* dipekerjakan untuk membuat gua-gua persembunyian dan perlindungan kapal terbang. Disamping itu, para *romusa* di proyek Badug ini juga dikerahkan untuk mengerjakan pertanian di desa Gendeng dekat Badug untuk menanam sayur-sayuran dan palawija guna memenuhi kebutuhan makanan Jepang dan para *romusa* itu sendiri. Setiap kecamatan mengirim *romusa* dari satu desa untuk waktu tertentu kemudian diganti *romusa* dari desa lain. Begitulah terus menerus secara bergantian. Mereka bekerja siang dan malam. Siang hari mereka bekerja sejak pukul 07.00-16.00 dan malam hari sejak pukul 19.00-04.00.³² Sebagai pekerja yang mengerjakan pekerjaan berat di Badug, para *romusa* mendapatkan upah antara f 0,20 - f 0,35. Sebagai *romusa* lama bekerja mereka bervariasi ada yang satu setengah dan ada yang sampai dua tahun.³³

b. Mrangi

Mrangi terletak di kelurahan Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul dekat Parangtritis. Di tempat ini para *romusa* bekerja membuat gua-gua

²⁹ *Ibid*, hal : 28-29

³⁰ *Ibid*, hal : 30

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, hal : 34 – 35.

³³ *Ibid*, hal : 54.

persembunyian serta kubu-kubu pertahanan serta penyimpanan senjata.³⁴ Untuk mengerjakan proyek Mrangi ini, para *romusa* mendapatkan upah antara f 0,25 dan harus dipotong f 0,01 untuk mandornya. Dengan upah sebesar itu, para *romusa* tidak mendapatkan jatah makan. Para *romusa* ini melaksanakan proyek di Mrangi secara terus menerus selama dua tahun. Namun ada pula yang hanya empat bulan saja.³⁵

c. Kaliurang

Kaliurang terletak di lereng Gunung Merapi. Ditempat ini para *romusa* dipekerjakan untuk membuat arang, gua persembunyian dan kebun sayur. Pembuatan arang di dekat Telogo Putri dan ladang sayuran di Penting dan Bedoyo. Sedangkan pembuatan gua dan terowongan (kubu) di dekat Turgo. Selain membuat gua, para *romusa* di Kaliurang juga dipekerjakan untuk membuat kubu-kubu di atas tanah yang biasa disebut dengan *terowongan*.³⁶ Para *romusa* umumnya bekerja sejak pukul 07.00 sampai 16.00 dengan istirahat pada pukul 12.00 selama satu jam. Upah yang diterima oleh *romusa* dalam mengerjakan tugas-tugasnya di Kaliurang ini adalah berkisar f 0,10 – f 0,50.³⁷ Kebanyakan mereka mengerjakan tugas tersebut sebagai *romusa* selama tiga tahun yang terlama. Namun ada pula yang melaksanakan tugas sangat singkat, yaitu selama lima hari setiap bulannya.³⁸

d. Selokan Mataram

Para *romusa* yang mengerjakan proyek ini disuruh oleh perangkat desa seperti kalau ada gotong royong kerja bakti. Untuk mengerjakan pekerjaan pembuatan Selokan Mataram, para *romusa* mendapatkan upah dari pemerintah Jepang sebesar f 0,35 – f 0,50.³⁹ Namun pada kenyataannya banyak pula *romusa* yang mengerjakan proyek ini tanpa mendapat bayaran sedikitkan namun hanya mendapatkan jatah makan satu kali dalam sehari. Para *romusa* dikerahkan jika akan dipekerjakan saja. Lama bekerja juga sangat bervariasi ada yang bekerja satu hari dalam satu bulan, ada yang bekerja lima hari dalam lima bulan, dan ada pula yang bekerja satu hari dalam dua bulan.⁴⁰

³⁴ *Ibid*, hal : 38

³⁵ *Ibid*, hal : 55

³⁶ *Ibid*, hal : 36

³⁷ *Ibid*, hal : 53

³⁸ *Ibid*, hal : 55

³⁹ *Ibid*, hal : 53

⁴⁰ *Ibid*, hal : 55

2. Mereka yang dikirim ke proyek-proyek di luar lingkungan DIY tetapi masih di Pulau Jawa. Mereka dikirim antara lain ke :

a. Banten

Di Banten, para *romusa* dipekerjakan pada proyek pembuatan lapangan terbang, pembuatan jalan kereta api, penambangan batubara, dan juga pembuatan jalan. Bagi yang harian setiap orang mendapat upah antara f 0,24 – f 0,35 ditambah dengan beras dan makan satu kali sehari. Sedangkan yang sistem borongan setiap *romusa* mendapatkan upah f 0,24 – f 0,35.⁴¹ Sebagai *romusa* para pekerja di Banten melaksanakan tugas selama dua tahun hingga tiga tahun.⁴²

b. Jakarta

Di Jakarta, para *romusa* bekerja sebagai kuli di pelabuhan Tanjung Priok, membuat gua persembunyian, membuat lapangan terbang kemayoran, menimbun rawa, dan ada pula yang mengerjakan pekerjaan bersih-bersih rumah prajurit Jepang. Atas kerjanya para *romusa* di Jakarta mendapatkan upah sebesar f 0,27 – f 0,40 dengan besar potongan f 0,07 – f 0,09 untuk uang makan.⁴³ Mereka melaksanakan tugas sebagai *romusa* paling singkat tiga bulan dan paling lama tiga tahun.⁴⁴

c. Gresik

Di Gresik, para *romusa* dipekerjakan di pabrik pembuatan garam dengan membuat selokan dan mengeruk lumpur ke sungai. Upah mereka juga tidak jauh berbeda dengan para *romusa* dari tempat lain di Jawa. Dari mereka banyak yang melarikan diri ke Yogyakarta.⁴⁵

d. Surabaya

Di Surabaya, para *romusa* banyak dipekerjakan di pabrik kayu, pembuatan jalan, juga ada yang bekerja di pabrik garam yang lingkungannya sangat kumuh sehingga banyak *romusa* yang jatuh sakit.⁴⁶ Upah mereka berkisar antara f 0,17 – f 0,50. Para *romusa* yang bekerja di daerah ini paling singkat ada yang hanya satu bulan, namun yang paling lama ada yang hingga dua tahun.⁴⁷

3. Mereka yang dikirim ke proyek-proyek di luar lingkungan DIY diluar pulau Jawa tetapi masih di wilayah Negera Indonesia. Mereka antara lain dikirim ke :

⁴¹ *Ibid*, hal : 54

⁴² *Ibid*, hal : 55

⁴³ *Ibid*, hal : 54

⁴⁴ *Ibid*, hal : 55

⁴⁵ *Ibid*, hal : 47

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*, hal : 55

a. Sumatra

Para *romusa* yang dipekerjakan di luar DIY ada yang dikirim ke Sumatra, antara lain di Tanjung Pinang, Palembang, Pakabaru, Sungai Gerong, dan Bengkulu. Di Tanjung Pinang, *romusa* banyak dipekerjakan di pelabuhan, membuka hutan untuk ditanami sayuran, membuat jalan, dan ada pula yang diberi tugas untuk mengubur orang yang mati, membuat kolam dan juga membersihkan WC. Itu semua tergantung kebijakan mandornya. Di Palembang, pekerjaan *romusa* tidak jauh berbeda dengan di Tanjung Pinang. Di Sungai Gerong, *romusa* diperkerjakan untuk membuat jalan, gua persembunyian, serta petugas pemadam kebakaran. Di Bengkulu, *romusa* dipekerjakan untuk membuat lapangan terbang, membuat gua persembunyian. Selain itu para *romusa* di Sumatra banyak ditempatkan di Muara Enim, Deli, Pulau Kijang. Pekerjaan yang dikerjakan oleh para *romusa* tidak jauh berbeda dengan apa yang dikerjakan di tempat lain di Sumatra.⁴⁸

b. Kalimantan

Di Kalimantan, para *romusa* ditempatkan di Balikpapan, Banjarmasin, dan Pangkalan Bun. Di Balikpapan, *romusa* bekerja sebagai kuli di pabrik minyak tanah, menggali lubang perlindungan, serta ada pula yang membantu teknisi kelistrikan. Di Banjarmasin, *romusa* bekerja membuat lapangan terbang. Di Pangkalan Bun, *romusa* mengangkut kayu dan bongkar muat truk, disamping juga sebagai montir truk, membuat lapangan terbang, dan menggergaji kayu.⁴⁹

c. Nusatenggara dan Ambon

Di Nusa Tenggara, para *romusa* ditempatkan di Sumba dan mengerjakan tugas antara lain sebagai tukang untuk membangun rumah, terowongan, lubang persembunyian dan lapangan terbang. Sedangkan di Ambon para *romusa* dipekerjakan untuk menebang pohon, membangun rumah untuk pabrik kebutuhan sehari-hari (sabun, minyak kelapa, bumbu dan kain tenun).⁵⁰

d. Sulawesi

Di Sulawesi para *romusa* ditempatkan di Makassa (Ujungpandang). Mereka bekerja membuat lapangan terbang, jalan, gua perlindungan untuk menyimpan senjata dan keperluan lainnya.⁵¹

⁴⁸ *Ibid*, hal : 49

⁴⁹ *Ibid*, hal : 50

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*, hal : 51

4. Mereka yang dikirim ke proyek-proyek di luar lingkungan DIY hingga ke luar wilayah Indonesia. Mereka antara lain dikirim ke :
 - a. *Singapura*. Di tempat ini para *romusa* dipekerjakan di pabrik minyak yaitu mengisi minyak ke dalam drum kemudian diangkut ke tempat yang telah ditentukan. Juga membuat lubang persebunyian, bongkar muat kapal dipelabuhan.
 - b. *Birma, Siam*, dan tempat lain di Asia Tenggara. Tugas para *romusa* juga tidak jauh berbeda dengan mereka yang ditempatkan di tempat lain. Yang jelas mereka mengerjakan pekerjaan yang erat hubungannya dengan pemenuhan sarana dan prasarana pertahanan.

Mengenai bagaimana mereka mengakhiri masa kontraknya, kebanyakan mereka langsung bubar dan pulang ke daerah masing. Karena mereka sebagian besar hanya merupakan kontrak kesepakatan lesan dan bukan hitam diatas putih, maka mereka bubar dengan sendirinya ketika mendengar pengumuman bahwa Jepang telah kalah perang. Bahkan dari mereka ada yang mengakhiri masa kerjanya sebagai *romusa* habis karena tidak tahan akan perlakuan Jepang dan fasilitas yang diterimanya sebagai *romusa* yang jauh dibawah setandar. Dalam hal ini termasuk makan, pengobatan, perumahan, dan perlakuan yang jauh dibawah batas kewajaran.

Dari mereka yang kembali setelah perang usai, dan termasuk dalam melaksanakan masa kontraknya hingga habis sebagai *romusa* telah diupayakan oleh pemerintah untuk membantu pemulangan para anggota *romusa* kekampung halamannya. Namun karena penempatannya sebagai *romusa* yang tersebar ke seluruh Indonesia atau bahkan ke seluruh Asia Tenggara, maka mereka pulang dengan bermacam-macam cara. Ada yang dipulangkan oleh Tentara Inggris, adapula yang dipulangkan oleh Tentara Belanda, tetapi kebanyakan mereka pulang atas inisiatif mandor *romusa* dan pemerintah daerah setempat.⁵²

B. Kebijakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan seorang penguasa Kasultanan Yogyakarta ketika Jepang mulai memasuki kota tersebut. Beliau adalah seorang putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Beliau lahir pada tanggal 12 April 1912. Dalam hitungan Jawa jatuh pada tanggal 25 Rabiulakhir tahun Jimakir 1842. Ibunya bernama R.A. Kustilah yang kemudian menyandang gelar Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom. Sedangkan

⁵² *Ibid*, hal : 100

ayahnya adalah Gusti Pangeran Haryo Puruboyo yang kemudian diangkat menjadi Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara, putra mahkota Keraton Kasultanan Yogyakarta, untuk kemudian diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono VIII.⁵³

Sejak masa kecil Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah akrab bergaul dengan kebudayaan Belanda. Hal ini karena sejak kecil oleh ayahnya dititipkan pada keluarga Belanda. Bahkan hingga menjelang pengangkatannya sebagai penguasa Kasultanan Yogyakarta, Dorajatun (nama kecil Sri Sultan HB IX) mendapat kesempatan belajar di negeri Belanda. Di sana ia masuk di sekolah Gymnasium di Haarlem kurang lebih selama 9 tahun. Setelah memasuki masa kemahasiswaan, Dorajatun masuk Rijksuniversiteit di Leiden. Namun jenjang pendidikan itu tidak dapat diselesaikannya, karena gentingnya keadaan dunia menjelang meletusnya perang dunia II. Tahun 1939 Dorajatun dipanggil pulang oleh ayahnya, dan ketika itu pulalah pendidikan di Leiden harus ditinggalkannya pula.

Pada tanggal 22 Oktober 1939, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII wafat. Hal itu terjadi ketika kereta api yang ditumpanginya (*eendagse* : kereta api satu hari) baru saja berhenti di Stasiun Lempuyangan. Kereta api tersebut berangkat dari Stasiun Gambir yang ditumpangi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII bersama para keluarga guna menjemput kepulangan Dorajatun dari Belanda. Sri Sultan Hamengku Buwo VIII wafat setelah penyakit diabetesnya kambuh sejak perjalanan dari Gambir dan para medis di Rumah Sakit *Onder de Bogen* (sekarang Panti Rapih) gagal dalam usahanya menangani kesehatan beliau.⁵⁴

Sebagai seorang yang telah menerima keris Kyai Joko Piturun dari Sri Sultan HB VIII di Hotel Des Indes Jakarta, maka Dorajatun adalah seorang yang telah dipersiapkan untuk menjadi penguasa Kasultanan Yogyakarta menggantikan kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Hari penting penobatan sebagai penguasa kasultanan Yogyakarta tersebut terjadi hari Senin Pon tanggal 8 bulan Sapar tahun Jawa Dal 1871, atau dalam kalender masehi bertepatan dengan tanggal 18 Maret 1940.⁵⁵

Pada hari itu sebelum dikukuhkan sebagai sultan, pada pukul 11.00 Dorajatun dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar *Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putra Narendra Mataram*, lima menit kemudian beliau dinobatkan sebagai Sultan Kasultanan Yogyakarta dengan gelar *Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun*

⁵³ Atmakusumah, *Op. Cit*, hal : 21

⁵⁴ *Ibid*, hal : 38

⁵⁵ *Ibid*, hal : 48

Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kaligatullah Kaping IX. Setelah acara penobatan selesai, maka tiba kesempatan Bagi Dorajatun yang sekarang sudah menjadi Sultan Hamengkubuwono IX untuk menyampaikan pidatonya yang pertama kali sebagai Sultan yang disampaikan dalam bahasa Belanda. Dalam buku “Tahta Untuk Rakyat Celah-Celah Kehidupan Sri Sultan Hamengkubuwono IX” cuplikan pidato tersebut dalam bahasa Indonesia dapat disampaikan begini :

“Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Maka selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam Keraton yang kaya akan tradisi ini. Izinkahlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan Nusa dan Bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya”⁵⁶

Jika dicermati dari pidato tersebut terdapat kata-kata yang sifatnya progresif dan mementingkan rakyat. Kata-kata tersebut adalah “...semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan Nusa dan Bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya”. Ternyata kata-kata tersebut tidak hanya menjadi kata simbolik dalam upacara penobatan Dorajatun sebagai Sultan Yogyakarta. Sejarah telah membuktikan bahwa yang telah disampaikan telah dibuktikan pada masa-masa sesudahnya. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kebijakan-kebijakan yang diambilnya selalu memihak kepada rakyat.

Sementara itu kondisi politik dunia internasional semakin memanas. Pengeboman oleh pasukan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941 telah menyeret Jepang dalam kancang Perang Dunia II (Perang Pasifik). Gerakan pasukan Jepang bagaikan kilat dengan cepat menguasai daerah-daerah yang dianggapnya penting untuk mendukung kemenangan dalam Perang Pasifik. Pada tanggal 1 Maret 1942 tentara Jepang mulai mendarat di Jawa yaitu Banten, Indramayu, dan Bojonegoro.⁵⁷ Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 1942 sudah mulai memasuki Kota Yogyakarta dan selanjutnya menempati markasnya di Hotel Garuda Sekarang.⁵⁸

⁵⁶ Atmakusumah, *Op. Cit.* hal : 53

⁵⁷ Moedjanto, *Op. Cit.* hal : 72

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1985) hal : 159

Sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai raja yang selalu mementingkan kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya sudah mulai tampak ketika tentara Jepang mulai memasuki kota Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyampaikan pernyataan kepada tentara pendudukan Jepang agar segala hal yang menyangkut daerah Kasultanan Yogyakarta dibicarakan terlebih dulu dengan beliau.⁵⁹ Hal ini dilakukan agar Sri Sultan Hamengkubuwono IX selalu mengetahui kebijakan Jepang yang akan menimpa rakyatnya di Yogyakarta.

Rupanya politik Sri Sultan HB IX ini tidak mengundang kecurigaan pihak Jepang. Bahkan mereka menyetujuinya. Pada tanggal 1 Agustus 1942, Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk kedua kalinya dikukuhkan sebagai penguasa dan Sultan Yogyakarta oleh Panglima Besar Tentara Pendudukan Jepang di Jakarta. Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang daerah Kasultanan Yogyakarta berstatus sebagai *Kochi* atau Daerah Istimewa. Karena itulah Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan *Yogyakarta Kochi*. Pada kesempatan itu sebagai *Yogyakarta Kochi* Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga menerima beberapa petunjuk dasar pemerintahan dari *Gunseikan* yaitu Kepala Pemerintahan Pendudukan Jepang di Jakarta.⁶⁰ Meski demikian, Sri Sultan Hamengkubuwono dengan hati-hati dan penuh pertimbangan selalu berusaha melepaskan diri dari pengaruh Jepang. Hal ini tampak dalam kata-kata yang diselipkan dalam pidato sumpah setianya yang disampaikan pada tanggal 1 Agustus 1942 di Jakarta, sebagai berikut :

“.....*Sesungguhnya saya merasa kecewa sekali, bahwa pada waktu Tentara Dai Nippon menyerbu ke Tanah Jawa, saya mengambil tindakan melawan Bala Tentara Dai Nippon, meskipun karena terpaksa desakan dari pihak Balatentara Belanda dulu dan bukan sekali-kali karena kemauan sendiri....*”⁶¹

Kemungkinan kalimat itu diselipkan dalam pidatonya karena untuk mengelabui para pembesar Jepang dan sekaligus untuk melunakkan hati mereka agar Sri Sultan Hamengkubuwono IX tetap diperbolehkan dan dipercaya memegang tampuk pimpinan di Kasultanan Yogyakarta. Sebab sangatlah tidak mungkin jika Sri Sultan Hamengkubuwono IX bertindak atas desakan Belanda. Karena diketahui sejak pelantikannya sebagai Sultan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menunjukkan sikapnya yang anti Belanda.

⁵⁹ Sutrisno Kutoyo, *Sri Sultan Hamengkubuwono IX Riwayat Hidup dan Perjuangan*, (Mutiaras Sumber Widy, 1997) hal : 111

⁶⁰ *Ibid*, hal : 112

⁶¹ Cuplikan Arsip Kraton Kasultanan Yogyakarta, dalam Suwarno, *Hamengkubuwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1994), hal : 100

Telah dikemukakan di muka, bahwa dalam pidato pelantikannya sebagai sultan, Sultan Hamengkubuwono IX akan selalu membela rakyatnya. Pada masa pendudukan Jepang ini ucapan tersebut juga dibuktikan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak jarang mengajukan protes kepada tentara pendudukan Jepang akibat sikapnya yang semena-mena terhadap rakyat Yogyakarta. Oleh karena itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX sering mendapatkan teguran. Bahkan ketika para raja Jawa Tengah dipanggil oleh pimpinan pemerintah militer Jepang (*Saiko Shikikan*) Sri Sultan Hamengkubuwono IX sering dipanggil sendiri untuk mendapatkan teguran dan diberi peringatan.⁶² Sikap Sri Sultan HB IX tersebut adalah merupakan kebijakan yang membela kepentingan rakyat meski harus dengan resiko mendapat sanksi dari tentara pendudukan Jepang yang terkenal kejam.

Pada masa pendudukan Jepang yang berlangsung tiga setengah tahun (1942 – 1945), terdapat beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah Tentara Pendudukan Jepang antara lain dengan pembentukan Gerakan Tiga A pada bulan April 1942 yang pada bulan Maret 1943 digantikan dengan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) dan bulan Januari 1944 dirubah menjadi Jawa Hokokai. Seinendan dan Keibodan (April 1943), Heiho (pertengahan tahun 1943), Romusa (Oktober 1943), PETA (Oktober 1943). Dari sekian program-program Jepang tersebut setelah dikaji ternyata hanya untuk kepentingan Jepang dalam rangka penggalangan daya dan dana dalam usahanya mendukung pencapaian kemenangan bagi Jepang dalam Perang Pasifik yang telah berlangsung. Dari program-program Jepang tersebut yang betul-betul terasa menyengsarakan rakyat Indonesia adalah Pengerahan Romusa.

Masa pendudukan Jepang di Indonesia menyisakan penderitaan yang sangat mendalam bagi sebagian besar wilayah di Indonesia. Kewajiban pada petani untuk menyerahkan padi, ternak, dan hasil bumi lainnya kepada balatentara Jepang merupakan potret kesengsaraan rakyat. Disamping itu bagi orang kaya wajiib menyerahkan perhiasan perak, intan, emas dan benda berharga lainnya. Pagar besi, rel kereta api pada jalur sepinya banyak yang dicabuti dan dipakai untuk keperluan Jepang. Hal itu merupakan bukti nyata kerakusan bala tentara Jepang. Romusa yang merupakan kewajiban untuk menyerahkan tenaga demi kepentingan perang Jepang merupakan sisi lain dari kekejaman Jepang yang banyak di rasakan bagi warga Asia dimana Jepang menjadi penguasa. Diantara mereka banyak yang tidak diketahui nasibnya.

⁶² Atmakusumah, *Op. Cit.*, hal : 62

Lain halnya dengan di Yogyakarta. Program pengerahan romusa dapat ditekan, sehingga banyak jiwa rakyat Yogyakarta yang terselematkan. Tentu saja hal itu bukan tanpa sebab. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai penguasa Kasultanan Yogyakarta, selalu berusaha memenuhi janjinya seperti yang telah diucapkan dalam pidato pelantikannya sebagai Sultan Yogyakarta yang ke IX. Dalam pidatonya beliau berjanji akan berjuang demi nusa dan bangsa. Hal ini jelas bahwa segala kebijakannya selalu memihak rakyat. Juga dalam hal pengerahan romusa ini. Dengan kemampuan politik yang dituangkan dalam diplomasinya, Sri Sultan berhasil meyakinkan Jepang bahwa keadaan alam di Yogyakarta tidak dapat mendukung politik Jepang tersebut, selama tidak ada perbaikan. Jawatan kependudukan dan sumber daya alam sengaja membuat daftar statistik yang direndahkan. Jumlah penduduk, hasil pertanian, peternakan dan kekayaan alam lainnya sengaja dibuat lebih rendah dari sebenarnya. Bahkan Jepang dibuatnya yakin bahwa kota Yogyakarta adalah merupakan daerah yang minus. Hasil bumi yang dihasilkan tidak mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Penyebab utama ialah lahan pertaniannya sungguh sempit. Lagi pula selalu dalam ancaman banjir pada musim penghujan. Dan sebaliknya mengalami masa kekeringan pada musim kemarau. Hal itu karena tidak adanya sistem pengairan (irigasi) yang memadai. Dari pola pikir itu maka Sri Sultan Hamengkubuwono IX berpendapat bahwa jika diadakan pembangunan maka akan lebih banyak lahan pertanian yang dapat ditanami. Dengan demikian tentu saja hasilnya juga makin bertambah banyak. Hal ini juga akan berpengaruh pada banyaknya setoran hasil bumi kepada pemerintah pendudukan Jepang.⁶³

Dengan kemampuannya berdiplomasi dan kehati-hatiannya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mampu mengambil hati pemerintah Jepang. Bahkan tanpa diduga pihak Jepang tidak keberatan mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membangun saluran irigasi tersebut. Dengan demikian pada zaman Jepang di Kasultanan Yogyakarta diadakan pembangunan saluran irigasi, pintu air lengkap dengan bangunan pengontrol, bendungan, jembatan dan tanggul. Pengairan di Yogyakarta tersebut dinamakan Bendungan *Gunsei Hasuiro* dan *Gunsei Yosuiro*. Dengan adanya proyek tersebut maka Sri Sultan Hamengkubuwono IX mempunyai alasan yang kuat untuk menolak atau mengurangi jumlah romusa yang diminta oleh pemerintah pendudukan Jepang. Alasan yang dipakai adalah karena saat itu Yogyakarta juga membutuhkan tenaga yang cukup banyak untuk mengerjakan proyek raksasa pembuatan saluran air.⁶⁴

⁶³ Sutrisno Kutoyo, *Op. Cit.*, hal : 116

⁶⁴ *Ibid*, hal : 117

Hal lain yang menunjukkan bahwa kebijakan Sri Sultan Hamengkubowono IX yang selalu memihak rakyat terlihat dalam pidatonya yang disampaikan melalui radio yang disiarkan pada tanggal 12 Desember 1941. Inti dari isi pidato tersebut adalah sebagai berikut: 1) menghimbau agar seluruh rakyat dapat mementingkan keperluan orang banyak dibanding kepentingan pribadi, 2) menghimbau pada seluruh rakyat jangan mendengarkan ucapan orang yang tak berwenang memerintah, jangan tergiur omong kosong yang akan merusak ketentraman, 3) Sri Sultan Hamengkubuwono IX siap membantu rakyat, jika perlu akan turun tangan secara pribadi, 4) Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengajak berbagi tugas agar rakyat bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX bertindak pula sesuai dengan tanggungjawab beliau.⁶⁵

Kebijakan yang berorientasi pada pembelaan rakyat kecil juga tampak dalam hal tindakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX seperti dibawah ini. Pada masa pendudukan Jepang Sri Sultan Hamengkubuwono IX menginstruksikan kepada pangreh praja agar mencegah para petani miskin menjual tanah miliknya, jika tidak dalam keadaan terpaksa sekali. Dan jika hal itu terpaksa terjadi maka diperintahkan agar kas desa yang membelinya serta memberi keleluasaan kepada penjualnya untuk dapat membelinya kembali di kelak kemudian hari. Bagi mereka yang sungguh-sungguh miskin dan tidak mendapat bantuan dari pihak atau badan manapun akan mendapat bantuan dari "daftar sipil" (kas karaton) dan kas kasultanan.⁶⁶

C. Pembangunan Selokan Mataram

Selokan Mataram yang membentang dari barat ke timur, membelah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata menyimpan cerita sejarah tersendiri. Keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memerintah Keraton Yogyakarta dari tahun 1940-1988. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX situasi sekitar Yogyakarta adalah situasi pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga beliau tidak banyak terfokus pada pembangunan fisik. Sosok Sri Sultan Hamengkubuwono IX lebih menonjol sebagai pengayom rakyat yang sedang terjajah. Selain itu, beliau juga berperan besar dalam keberadaan atau proses demokratisasi dan modernisasi Kraton Yogyakarta. Pada masa ini terjadi perubahan penting, yakni bergesernya konsep kekuasaan Jawa absolut ke arah yang bersifat

⁶⁵ Suwarno, *Op. Cit.*, hal : 82 - 84

⁶⁶ *Ibid*, hal : 93-94

demokratis, yaitu dari konsep *Keagunbinatharaan* menjadi konsep kekuasaan "Tahta Untuk Rakyat"⁶⁷. Salah satu tindakan yang mengukuhkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai pemegang "Tahta Untuk rakyat" tampak dari peranan beliau dalam penempatan tenaga kerja romusa di wilayah Yogyakarta⁶⁸.

Pada masa penjajahan Jepang, rakyat Yogyakarta sangat menderita. Mereka diperlakukan secara kasar dan kejam oleh tentara Jepang dalam rangka memenuhi kebutuhan perang. Jepang merampas ternak, padi dan bahkan perhiasan dari tangan rakyat. Selain itu, Jepang juga merekrut tenaga rakyat untuk dijadikan romusa yang disalurkan ke luar Pulau Jawa untuk mengerjakan proyek-proyek pembangunan sarana transportasi, pertanian dan perkebunan untuk kepentingan pemenangan perang bagi pihak Jepang. Melihat hal itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX melancarkan aksi protes terhadap pemerintah Jepang, yang justru dijawab dengan peringatan dan ancaman. Oleh sebab itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mencoba menyelamatkan rakyatnya dengan cara lain. Dengan berpikir cerdas, beliau melaporkan kepada Jepang mengenai angka jumlah penduduk dan jumlah hasil bumi yang telah dimanipulasi. Dijelaskan pula bahwa wilayah Yogyakarta sangatlah sempit, sementara lahan yang ada tidak seluruhnya dapat ditanami padi karena kekurangan air dan sebagian lahan yang lain justru tergenang air, sehingga sulit bagi rakyatnya untuk menyediakan bahan pangan yang mencukupi kebutuhan tentara Jepang. Dengan memaparkan alasan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintahan Jepang mengusulkan agar romusa dari wilayah Yogyakarta dapat mengerjakan proyek-proyek di wilayah Yogyakarta sendiri. Proyek yang diusulkan oleh beliau adalah pembangunan saluran irigasi dan pintu air sehingga nantinya lahan sawah yang ada bisa ditanami dengan tanaman pangan dan pada gilirannya bisa meningkatkan hasil bumi, terutama padi yang memberikan kontribusi penting bagi Jepang. Akhirnya, usulan yang rasional tersebut disetujui oleh Jepang.

Dua saluran air besar pun dibangun di dua tempat, yaitu saluran yang terletak di Adikarto dan Sleman *Ken*. Saluran yang terletak di Adikarto dikenal dengan nama *Gunsei*⁶⁹-*Haisuiri*⁷⁰ berfungsi untuk pembuangan air, sedangkan yang di daerah Sleman

⁶⁷ Moedjanto, G., *Konsep kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 65.

⁶⁸ Atmakusumah *Op. Cit.* hal. : 45.

⁶⁹ *Gunsei* berarti pemerintahan militer. Daigakusyorin, *Kamus Lengkap Bahasa Jepang-Indonesia, Indonesia-Jepang*, (Surabaya: Pustaka Tinta Masyarakat, t.t.), hlm. 159.

⁷⁰ *Haisuiri* berarti terusan pembuangan air atau jalan pintu air. Daigakusyorin, *Kamus Lengkap Bahasa Jepang-Indonesia, Indonesia-Jepang*, (Surabaya: Pustaka Tinta Masyarakat, t.t.), hlm. 220.

Ken digunakan untuk pengairan yang disebut *Gunsei Yosuiro*⁷¹ atau saat ini dikenal dengan nama Selokan Mataram. Pekerjaan pembangunan *Gunsei Haisuiro* dimulai pada bulan Mei tahun 2604 dengan diadakannya pemeriksaan daerah dan pekerjaan ukur-mengukur yang rencananya akan diselesaikan pada bulan Juni tahun 2604.⁷² Alasan dibangunnya *Gunsei Haisuiro* adalah untuk mencegah meluapnya air laut ke daratan karena hampir setiap tahun ketika musim hujan, daerah Adikarto selalu terendam banjir sehingga menimbulkan bencana pada sawah-sawah atau desa-desa. Selain itu, merunut sejarah ketika masa penjajahan Belanda, daerah Adikarto (Sewugalur) yang pada waktu itu sawah-sawahnya masih digunakan oleh pabrik-pabrik, khususnya pabrik gula, jalannya pengairan diatur dengan sebaik-baiknya. Dan karena daerah tersebut sering sekali terserang air bah sehingga hampir semua sawah tergenang air, maka untuk menghindari bencana yang sangat membahayakan tanaman tebu itu di beberapa tempat dipasanglah pompa air yang dapat membuang air dalam waktu singkat. Namun, setelah pabrik dimatikan dan sawah-sawah tak lagi dikerjakan untuk keperluan pabrik, maka pompa-pompa tersebut diambil pula. Sejak itulah, rakyat Adikarto selalu tertimpa bencana banjir yang mengakibatkan kekurangan pangan karena tanaman di sawah atau kebun mati.⁷³

Pada tanggal 10 Juli 2604, pemerintah *Kooseityo* ditetapkan sebagai badan yang bertanggungjawab atas pekerjaan itu. Selanjutnya, pada tanggal 20 Juli 2604 diadakan upacara pembukaan pekerjaan secara besar-besaran dengan dihadiri oleh P.J.M. Gunseikan dan pekerjaanpun dimulai. Ir. Hiromatsu ditunjuk sebagai orang yang bertanggungjawab dari Kooti Zimukyoku, sedangkan Ir. K.R.T. Mertonegoro dari Kooseityo Doboku Kyokutyo.⁷⁴ Untuk mendukung fungsinya sebagai saluran pembuangan air ke laut selatan, di selokan ini dipasanglah enam pintu air yang dapat membuka dan menutup sendiri. Bila air bah datang dari daratan, pintu air tersebut akan membuka dengan sendirinya. Dan tiap-tiap pintu air setiap satu detik dapat membuang air sebanyak 15m³. Sebaliknya jika laut pasang dan airnya meluap ke arah selokan, maka pintu air ini akan tertutup, sehingga air laut tidak bisa naik ke daratan.⁷⁵ Akhirnya, pada

⁷¹ *Yosuiro* berarti waduk, kolam persediaan air atau air irigasi. Daigakusyurin, ***Kamus Lengkap Bahasa Jepang-Indonesia, Indonesia-Jepang***, (Surabaya: Pustaka Tinta Masyarakat, t.t.), hlm. 220.

⁷² *Harian Sinar Matahari* Tahun ke IV No. 162 Sabtu Kliwon 7-7 Gatu 2605, *Gunsei Yo-Haisuiro Jogjakarta (Pekerjaan Raksasa dalam Peperangan jang semakin Dahsjat I)*, hlm 2.

⁷³ *Harian Sinar Matahari* Tahun ke IV No. 162 Sabtu Kliwon 7-7 Gatu 2605, *Gunsei Yo-Haisuiro Jogjakarta (Pekerjaan Raksasa dalam Peperangan jang semakin DahsjatI)*, hlm 2.

⁷⁴ ***Harian Sinar Matahari*** Tahun ke IV No. 162 Sabtu Kliwon 7-7 Gatu 2605, *Gunsei Yo-Haisuiro Jogjakarta (Pekerjaan Raksasa dalam Peperangan jang semakin Dahsjat I)*, hlm 2.

⁷⁵ ***Harian Sinar Matahari*** Tahun ke IV No. 163 Senin Paing 9-7 Gatu 2605, *Gunsei Yo-Haisuiro Jogjakarta (Pekerjaan Raksasa dalam Peperangan jang semakin Dahsjat, penutup)*, hlm 2.

akhir bulan Desember tahun 2604 pembangunan *Gunsei Haisuiro* selesai dengan menghabiskan biaya lebih dari f308.000 dan untuk pekerjaan tanah telah bekerja lebih dari 661.000 orang romusa biasa dan lebih dari 165.000 orang romusa sukarela. Dengan dibangunnya selokan ini, rakyat seluruh Adikarto terhindar dari bencana banjir dan gangguan penyakit malaria. Selain itu juga akan meningkatkan hasil padi kira-kira 30.000 kuintal dalam setahun.⁷⁶

Proyek irigasi yang kedua adalah membangun *Gunsei Yosuiro*, yaitu saluran penghubung antara Sungai Progo dan Sungai Opak yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama Selokan Mataram. Selain dilatarbelakangi oleh alasan-alasan rasional, salah satunya untuk meningkatkan hasil pertanian, pembangunan Selokan Mataram ternyata juga dipengaruhi oleh adanya kepercayaan rakyat Yogyakarta terhadap ramalan-ramalan masa depan bumi Mataram⁷⁷. Terdapat dua versi ramalan yang menyangkut masa depan Keraton Yogyakarta, khususnya yang berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pertama, yaitu Yogyakarta akan makmur bila Sungai Progo di sebelah barat bertemu dengan Sungai Opak di sebelah timur. Kedua, Yogyakarta akan menjadi makmur dan rakyatnya sejahtera apabila Keraton Yogyakarta berada di sebelah selatan Sungai Progo. Dalam budaya Jawa, banyak ramalan-ramalan yang disampaikan dengan simbol-simbol, sehingga ramalan tersebut harus dipecahkan untuk mengetahui apa yang tersirat dibalik yang tersurat.

Bertemunya dua sungai besar di wilayah Yogyakarta secara logika adalah hal yang mustahil, tetapi karena ramalan merupakan suatu petunjuk, maka bagi orang Jawa hal yang mustahil pun akhirnya bisa terwujud. Ramalan itu ditangkap oleh Sultan Hamengkubuwono IX sebagai petunjuk untuk membuat saluran dari Sungai Progo ke arah timur, sehingga saluran tersebut nantinya akan menghubungkan Sungai Progo dengan Sungai Opak. Lalu, secara rasional agar air dari Sungai Progo melalui saluran yang akan dibangun dapat mengairi persawahan di sebagian besar wilayah Keraton Yogyakarta, maka saluran tersebut harus dibangun di sebelah utara, yaitu di tempat yang secara fisik lebih tinggi. Jika saluran tersebut terwujud, maka sekaligus menjawab teka-teki ramalan yang kedua karena secara otomatis akan menempatkan Keraton Yogyakarta berada di sebelah selatan Sungai Progo, sebab air yang mengalir di saluran yang dibangun adalah air

⁷⁶ *Harian Sinar Matahari* Tahun ke IV No. 163 Senin Paing 9-7 Gatu 2605, *Gunsei Yo-Haisuiro Jogjakarta (Pekerjaan Raksasa dalam Peperangan yang semakin Dahsyat)*, penutup), hlm 2.

⁷⁷ Murdiyastomo, Agus, Pinasti, Indah Sri. *Selokan Mataram: Fungsi dan Maknanya bagi Rakyat Yogyakarta pada Masa Pendudukan Jepang*, (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta, 1995), hlm. 27.

Sungai Progo. Dua kepercayaan mistik tersebut menjadi kekuatan spiritual bagi rakyat Yogyakarta yang terlibat langsung pembangunan Selokan Mataram.

Rakyat mulai membangun Selokan Mataram pada akhir bulan Agustus tahun 2604. Pekerjaan yang paling penting adalah pekerjaan memperbesar pintu air karena pintu air tersebut sebagian masih dipakai untuk memasukkan air yang saat itu sangat diperlukan untuk pertanian. Selain itu, tanah lempung yang dibutuhkan untuk membuat bendungan di tempat tersebut tidak ada, sehingga pekerjaan yang telah dikerjakan selama setahun terlihat tidak mengalami kemajuan⁷⁸. Selokan yang panjangnya 21 km ini mempunyai terowongan sepanjang 600 meter dan 52 jembatan⁷⁹. Berawal dari Bendungan Karangtalun di Dusun Karangtalun, Desa Karangtalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang yang terletak di sisi timur Sungai Progo, Selokan Mataram mempunyai jumlah areal pengairan seluas 15.734 ha. Bendungan Karangtalun mempunyai saluran sepanjang tiga kilometer. Di wilayah Dusun Macanan, Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, saluran tersebut terbagi menjadi dua, yang disebut Selokan van Der Wijck dan Selokan Mataram. Bendungan Karangtalun dan Selokan Van Der Wijck dibangun pada masa pendudukan Belanda (1909). Pada saat itu, Belanda sengaja membangun sarana-sarana pengairan dengan tujuan untuk memperluas sawah irigasi teknis. Selokan Mataram selesai dibangun dan telah menghubungkan Bendungan Karangtalun di Sungai Progo dan Sungai Opak di Dusun Kowang, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman pada tahun 2605.

Dengan selesainya pembangunan Selokan Mataram, pada tanggal 5 Juli 2605 dilakukan upacara pembukaan secara resmi parit pengairan di Karangtalun dengan dihadiri oleh Soomobutyo Kakka sebagai wakil Gunseikan Kakka, Yamauti Gunseisibu Tyookan, Jogjakarta Kooti Zimu Kyoku Tyookan, Kedu Syuutyookan, Banjumas Syuutyookan. Selain itu hadir pula S.P. Jogjakarta Koo, S.P. Mangkunegoro Koo, S.P. Pakualam Koo, sedangkan S.P. Solo Koo diwakili oleh utusannya, yaitu G.P.A. Koesoemojoedo dan G.P.A. Praboewidjojo⁸⁰. Dalam sambutannya, Soomobutyoo Kakka menyatakan bahwa selesainya pekerjaan besar ini karena kehebatan tenaga rakyat yang telah disatukan untuk melipatgandakan hasil bumi dan menghancurkan musuh.

⁷⁸ *Harian Sinar Matahari* Tahun ke IV No. 163 Senin Paing 9-7 Gatu 2605, *Gunsei Yo-Haisuiro Jogjakarta (Pekerjaan Raksasa dalam Peperangan yang semakin Dahsyat, penutup)*, hlm 2.

⁷⁹ *Harian Asia Raya* 5 Juli 2605 *Kehebatan Tenaga Rakjat bila Dipersatoekan (Oepatjara Besar Penyelesaian Pekerjaan Pengairan Besar)*.

⁸⁰ *Harian Asia Raya* 5 Juli 2605 *Kehebatan Tenaga Rakjat bila Dipersatoekan (Oepatjara Besar Penyelesaian Pekerjaan Pengairan Besar)*.

Memang, dalam proses pembangunan Selokan Mataram telah melibatkan banyak pihak, yaitu pemerintah militer Jepang bertindak sebagai pengawas dan pemerintah Keraton Yogyakarta, khususnya bidang Kemakmuran dan Pekerjaan Umum sebagai pelaksana. Untuk kelancaran kegiatan di lapangan, baik administrasi maupun pengerahan tenaga kerja, maka dilibatkan pula pemerintah setempat (*Kapanewon* dan Kelurahan). Pembangunan Selokan Mataram dimulai dengan pengukuran dan pematokan yang dilakukan oleh pihak Keraton Yogyakarta dibantu dengan aparat kelurahan setempat. Jika diamati, Selokan Mataram mempunyai aliran sungai yang berkelok-kelok, walaupun lahan di sekitarnya mempunyai ketinggian yang sama, sehingga seharusnya memungkinkan untuk membuat sungai mengalir lurus tanpa kelokan. Namun ternyata, dibuatnya kelokan tersebut mempunyai cerita tersendiri. Dalam proses pengukuran, jika patok-patok mengenai rumah penduduk yang relatif mampu, penduduk yang bersangkutan akan berusaha menemui Mantri Ukur dan meminta agar patok selokan digeser. Permintaan tersebut akan dikabulkan jika penduduk tersebut bersedia *mbeseli* dan menjamu para Mantri Ukur⁸¹.

Setelah pengukuran, dilanjutkan dengan penggalian Selokan Mataram yang memerlukan tenaga kerja sangat besar karena waktu itu belum digunakan alat berat seperti traktor. Mulai tanggal 20 September sampai 20 Oktober 2604 para pengawas pekerja bekerja siang dan malam terus-menerus dibagi dalam tiga bagian. Mereka memberi contoh kepada para pekerja agar sebelum musim hujan datang, pekerjaan memperbesar pintu air sudah dapat diselesaikan karena pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan, mulai tanggal 20 Januari - 20 April 2605 pekerjaan dilakukan sampai jam 2 malam, sedangkan mulai tanggal 20 April hingga akhir bulan Mei pekerjaan dijalankan siang malam terus-menerus yang dibagi dalam tiga bagian⁸².

Para pekerja berasal dari desa-desa sekitar lokasi selokan, baik yang berada di sebelah selatan maupun utara selokan. Mereka dikerahkan bila akan dipekerjakan, dengan sistem giliran antara satu desa dengan desa lainnya. Mereka tidak bekerja secara terus-menerus secara bersama, ada kelompok yang bekerja satu hari dalam satu bulan, ada yang bekerja lima hari dalam lima bulan, dan ada pula yang bekerja satu hari dalam dua bulan. Tenaga kerja yang dipekerjakan di Selokan Mataram ini menyebut dirinya bukan sebagai

⁸¹ Agus Murdiyastomo, Indah Sri Pinasti, *Op. cit.*, hlm. 31.

⁸² *Harian Sinar Matahari* Tahun ke IV No. 163 Senin Paing 9-7 Gatu 2605, *Gunsei Yo-Haisuuro Jogjakarta (Pekerjaan Raksasa dalam Peperangan jang semakin Dahsjat, penutup)*, hlm 2.

romusa, tapi sebagai *narakarya*, walaupun sebenarnya artinya sama saja, yaitu pekerja⁸³. Tenaga kerja tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu buruh dan *kerik aji* (kerja bakti). Mereka yang dipekerjakan di Selokan Mataram ini banyak sekali sebab semua orang yang tanahnya mendapat aliran dari Selokan Mataram dikerahkan untuk bergotong-royong. Sampai pada akhir bulan Juni tahun 2605 banyaknya romusa yang telah menyelesaikan pekerjaan ini ada 1.289.000 dan 68.000 orang romusa sukarela, sedangkan biaya yang telah dikeluarkan sebanyak f1.600.000.

Masing-masing romusa tersebut mendapatkan upah yang berlainan, meskipun sebenarnya telah ada keputusan mengenai upah romusa berdasarkan Persetujuan Pemasokan Romusa antara Angkatan Darat (AD) ke 16 di Jawa dan Angkatan Laut (AL) Jepang di Makassar pada bulan Juli 1943. Dalam persetujuan itu ditetapkan upah romusa yang f3,00 harus dikirim kepada keluarganya, sedangkan bagi romusa yang bekerja di Jawa upah harian mula-mula ditetapkan f0,35, namun pada bulan November 1944 ketentuan itu diperbaiki, di Kota Jakarta dan Surabaya untuk laki-laki (16 tahun keatas) f0,50 dan untuk wanita f0,40, di Bandung dan Semarang untuk laki-laki (16 tahun keatas) f0,45 dan untuk wanita f0,35, di tempat lain, laki-laki f0,40 dan wanita f0,30⁸⁴. Romusa yang bekerja di Selokan Mataram diupah antara f0,35 dan f0,40, namun ada juga yang tidak dibayar sama sekali, mereka hanya mendapat jatah makan satu kali sehari.

Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa mereka diupah dengan sistem borongan. Dengan sistem borongan, upah kelompok buruh dihitung per m³ untuk galian dan per m² untuk meratakan tanah. Dalam sehari, mereka mendapat jatah makan sekali dan upah mereka diterimakan setiap akhir minggu (Sabtu). Upah yang diberikan tergantung seberapa banyak mereka menggali atau meratakan. Rata-rata setiap buruh bisa menggali sebanyak tiga sampai empat m³ dan upah rata-rata per hari yang mereka terima 10 sen. Uang sejumlah itu pada masa pendudukan Jepang bisa dibelanjakan untuk membeli sekitar 1 kg beras. Kelompok buruh ini dikoordinasi oleh para mandor. Setiap mandor rata-rata membawahi 30 orang buruh. Mandor diupah sebesar 15 sen per hari. Berbeda dengan kelompok buruh, kelompok *kerik aji* tidak diberi upah, namun mereka hanya mendapat jatah makan. Dengan dipimpin oleh aparat desa, mereka hanya bekerja setengah hari⁸⁵.

⁸³ P.J. Suwarno, *Romusa Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁸⁴ *Ibid*, hal : hlm. 52.

⁸⁵ Agus Murdiyastomo, Indah Sri Pinasti, *Op. Cit.*, hlm. 33.

Pengeralahan tenaga rakyat untuk pembangunan Selokan Mataram ini bisa sedikit mengurangi penderitaan rakyat. Selokan Mataram mempunyai fungsi dan makna yang besar bagi masyarakat Yogyakarta, khususnya di jaman pendudukan Jepang. Dengan adanya Selokan Mataram, sawah seluas kurang lebih 8200 ha akan mendapat pengairan sempurna, yang tadinya hanya dapat ditanami padi sekali dalam setahun, sekarang bisa dua kali sehingga hasil padi rata-rata bertambah 160.000 kuintal setahun. Empat atau lima tahun lagi, padi bisa bertambah 206.000 kuintal karena dengan ditambahkan pintu air tersebut, maka air yang dapat masuk ke dalam saluran itu yang tadinya hanya 5m³, sekarang bisa 10m³ tiap detik. Dengan demikian, penderitaan rakyat akibat penjajahan Jepang bisa sedikit ditekan karena sawah-sawah yang ada di sebelah selatan selokan bisa diairi sehingga lahan yang semula tidak bisa menghasilkan padi kemudian dapat ditanami padi.⁸⁶ Walaupun kemudian, sebagian padi yang dihasilkan harus disetorkan kepada Jepang. Selain itu, penduduk yang ikut bekerja setidaknya bisa mendapatkan makan dengan layak, meskipun hanya sekali sehari dengan sebungkus nasi sayur. Dampak lain dari dibangunnya Selokan Mataram adalah terbukanya beberapa desa yang dilalui selokan karena tanggul selokan kemudian diratakan dan menjadi jalan yang manfaatnya dapat dirasakan sampai sekarang. Makna yang secara langsung dapat dirasakan atas pembangunan Selokan Mataram adalah terselamatkannya penduduk sekitar proyek dari pemanggilan sebagai romusa.

Pada masa sekarang, keberadaan Selokan Mataram bermanfaat bagi lancarnya lalu-lintas transportasi penduduk sepanjang jalur Selokan Mataram karena adanya jalan inspeksi Selokan Mataram, terpenuhinya beberapa kebutuhan masyarakat akan sarana MCK dan tempat pemandian hewan, bertambahnya debit air tanah karena Selokan Mataram merupakan saluran yang beririgasi permanen, sehingga kegiatan pertanian tidak terlalu bergantung pada iklim atau alam karena petani dapat mengandalkan pengairan Selokan Mataram pada saat musim kemarau. Selain itu, adanya Selokan Mataram juga memunculkan beberapa lembaga yang berkaitan dengan pengairan dan penataannya. Lembaga-lembaga tersebut bekerjasama dengan lembaga lain yang berkaitan dengan pertanian, seperti *jaga bhaya* dan lembaga-lembaga sejenis di wilayah sepanjang Selokan Mataram berkaitan dengan pembagian debit air.

⁸⁶ *Harian Sinar Matahari* Tahun ke IV No. 152 Selasa Wage 26-6- Gatu 2605, Selokan Pengairan jang Terbesar di Djawa Tengah (Berkat Persatuan antara Rakjat dan Pemerintah, Pekerdjaan jang Tersukar Dapat Diselesaikan didalam Waktu jang Sesingkat-singkatnja), hlm. 2

Pemanfaatan Selokan Mataram berbanding lurus dengan permasalahan yang muncul. Saat ini semakin banyak berdiri bangunan pemukiman, baik permanen maupun semi permanen di sepanjang Selokan Mataram dan juga penggunaan pupuk buatan dan pestisida yang berlebihan pada areal sawah di sebelah utara selokan. Hal itu akan mempengaruhi kondisi mutu air karena saluran pembuangan dari sawah maupun pemukiman langsung dimasukkan ke Selokan Mataram.

BAB IV

PENUTUP

Selokan Mataram yang membentang dari wilayah Kulon Progo hingga Sleman dan menghubungkan dua sungai besar di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan sebuah bangunan monumental yang patut untuk dikenang dan diketahui sejarahnya. Bukan hanya sejarah asal-asul dibangunnya sebagai saluran air, namun yang lebih penting adalah sejarah sebagai nilai (*nilai luhur sejarah*) dibalik dibangunnya Selokan Mataram tersebut.

Selokan Mataram sebagai saluran air yang memegang peranan penting dalam sistim irigasi di daerah Yogyakarta, khususnya bagi lahan-lahan pertanian yang berada di sebelah selatan Selokan Mataram, dibangun pada masa pendudukan Jepang dimana rakyat Indonesia khususnya Yogyakarta mengalami masa sulit dibawah tekanan bala tentara pendudukan Jepang. Salah satu kebijakan Jepang yang begitu terasa amat menyengsarakan adalah adanya proyek pengerahan romusa oleh bala tentara Jepang. Banyak para pemuda yang merupakan sumber tenaga kerja produktif yang dimanfaatkan oleh Jepang sebagai romusa. Diantara mereka masih ada yang beruntung ditempatkan di Wilayah Yogyakarta. Namun sungguh malang bagi mereka yang ditempatkan di luar Kota Yogyakarta hingga keluar Jawa atau bahkan keluar Indonesia. Hal ini karena proyek romusa ini penempatannya adalah di seluruh wilayah kekuasaan Jepang di Asia.

Namun bagi rakyat Yogyakarta, rasa syukur masih ada, karena memiliki seorang raja yang benar-benar memikirkan nasib rakyatnya dalam berbagai kebijakannya. Beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Melihat adanya program pengerahan romusa oleh pemerintah Jepang yang sangat menyengsarakan rakyat tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai raja Kasultanan Yogyakarta segera mengambil tindakan. Melalui kemampuan diplomasinya yang tidak diragukan lagi beliau berhasil meyakinkan Jepang bahwa kondisi Yogyakarta sungguh tidak mungkin memenuhi kebutuhan Jepang yang harus menyerahkan hasil bumi untuk kepentingan Jepang. Hal ini akan menjadi mungkin jika kondisi Yogyakarta yang tandus dan dalam ancaman banjir jika hujan itu harus diadakah perubahan melalui pembangunan. Gagasan yang diajukan adalah dengan adanya proyek penggalian sistem irigasi. Dengan kematangan dalam mengolah data, maka proyek tersebut dikabulkan oleh Jepang. Bahkan biaya yang dibutuhkan ditanggung oleh bala tentara Jepang. Dari situlah maka dimulailah dengan penggalian saluran air yang menghubungkan Sungai Progo dan Sungai Opak yang kemudian dikenal dengan nama Selokan Mataram. Karena

proyek itu pulalah, maka ada banyak alasan bagi Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menolak dan mengurangi jumlah tenaga produktif yang diminta oleh Tentara Pendudukan Jepang dalam pengerahan Romusa.

Jika dikaji dan dicermati, maka munculnya Selokan Mataram adalah sebuah proses pemikiran yang dilandasi rasa Nasionalisme serta kecintaan terhadap rakyat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Selokan Mataram merupakan sebuah simbol monumental perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap kebijakan balatentara Jepang, khususnya dengan praktek romusnya. Nilai-nilai kepahlawanan tersebut perlu dikembangkan dan diwariskan kepada generasi penerus.

Berdasarkan pola pikir itulah, maka pada tahun 2009 di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta peristiwa pembangunan Selokan Mataram tersebut dimunculkan dalam dalam tata pameran tetap berupa diorama pembuatan Selokan Mataram. Diharapkan dengan munculnya penyajian diorama tersebut memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Penulisan hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi seputar sejarah pembangunan Selokan Mataram kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat tahu sejarah tentang Selokan Mataram, yang kini telah menjadi sumber pengairan bagi masyarakat di sebelah selatan Selokan Mataram. Bahwa air yang mengairi tanah-tanah pertanian mereka adalah air yang mengalir dari sebuah saluran yang menghubungkan dua sungai besar yaitu Sungai Progo dan Opak. Supaya mereka juga tahu bahwa air yang mengairi lahan pertanian mereka adalah berasal dari saluran air yang digali pada masa pendudukan Jepang, yang muncul dari gagasan seorang raja yang bijaksana yang selalu mementingkan nasib dan kesejahteraan rakyat. Yang telah menyelamatkan ribuan rakyat Yogyakarta dari proyek romusa Jepang yang terkenal dengan kekejamannya.

Selokan Mataram memang hanya merupakan sebuah saluran air, namun dalam dirinya terkandung informasi yang luar biasa yang perlu kita gali bersama-sama. Informasi-informasi lain yang masih tersimpan dan bertebaran dimasyarakat atau literatur-literatur lain kiranya masih harus kita cari demi lengkapnya penulisan naskah ini. Namun demikian kami tetap berharap agar tulisan mampu memberikan tambahan pengetahuan.

DARTAR PUSTAKA

1. Dharmono Hardjowidjono (ed), *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta Jilid II*, (Yogyakarta : Proyek Pemeliharaan Tempat Bersejarah Perjuangan DIY, 1984/1985)
2. Dwi Ratna Nurhajarini, *Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa 1946-1950*, (Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1994)
3. *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta : Ihtiar Baru – van Hoeve)
4. [http // museum virtual.org](http://museum.virtual.org) dan [http//id.wikipedia](http://id.wikipedia)
5. http://id.wikipedia.org/wiki/Percetakan_Uang_Republik_Indonesia#Sejarah
6. <http://rinanditya.webs.com/ekonomi19451959.htm> *Keadaan Ekonomi Indonesia Pada Masa Awal Kemerdekaan 1945 Hingga 1950.*
7. <http://www.rumahuang.com/sejarah-mata-uang-indonesia>
8. <http://www.uang-kuno.com/2008/03/sejarah-uang-indonesia-1.html>
9. Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid 6, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993),
10. Mohammad Hatta, “Menoetoeop Masa Penderitaan dan Kesoekaran”, *Kedaulatan Rakjat* tanggal 30 Oktober 1946.
11. Museum virutal <http://www.museum.virutal.org>
12. Notosusanto Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993)
13. Oe Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Jilid I (1945 – 1958)*, (Jakarta : LPPI, 1991)
14. Perum Peruri, *Pencetakan Uang Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa, Cukilan Fakta Dan Peristiwa*, (Jakarta : Perum Peruri, 1988)
15. Rahmawati Fitriani, *Perjalanan Panjang ORI*, (Bandung : Remaja Rasdakarya, 2008)
16. *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogyakarta*, (Jakarta : Kementerian Penerangan, 1953)
17. *UU No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral*

18. Wikipedia, <http://rd.wikipedia.org/wiki/uang>
19. Wiratsongko, dkk , *Banknotes and Coins From Indonesia 1945-1949*, (Jakarta : Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 Dan Perum Peruri Jakarta, 1991)